

## Lampiran 1. Sintesa Tinjauan Pustaka

Teori	Sintesa	Variabel
Keamanan Nasional	keamanan nasional mencakup keamanan militer dan territorial yang mana bertumpu pada keamanan insani ( <i>human security</i> ). Terdapat tujuh komponen keamanan insani menurut UNDP (1994) yaitu a) keamanan ekonomi; b) keamanan pangan; c) keamanan kesehatan; d) keamanan lingkungan hidup; e) keamanan personal; f) keamanan komunitas; dan g) keamanan politik.	1. Karakteristik Geospasial <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kerawanan Bencana</li> <li>b. Pengambilan Kebijakan</li> <li>c. Perencanaan Tata Ruang</li> </ol> 2. Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prediksi</li> <li>b. Interpretasi</li> <li>c. Respon</li> <li>d. Penyebaran Informasi dan Komunikasi</li> <li>e. Pengetahuan Tentang Risiko</li> <li>f. Kesiapsiagaan</li> </ol>
Teori Sistem Kewaspadaan Dini	Terdapat tiga prinsip dasar sistem kewaspadaan dini menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2012) yaitu prediksi, interpretasi, dan respon. Selain itu menurut UNDRR (2021) terdapat empat elemen kunci untuk menciptakan sistem kewaspadaan dini yang berpusat pada masyarakat yaitu pengetahuan risiko, pemantauan dan layanan peringatan, penyebaran dan komunikasi, serta kesiapsiagaan. Sistem kewaspadaan dini juga perlu diintegrasikan dengan penataan ruang yang mana mengendalikan pertumbuhan kepadatan bangunan dan kesesuaian pembangunan pada zona-zona tertentu.	
Teori Bencana Tanah Longsor	Salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di wilayah pegunungan akibat adanya curah hujan tinggi, kelerengan lahan yang curam, jenis batuan geologi, penggunaan lahan yang tidak sesuai, infrastruktur jalan, kepadatan penduduk, dan kegempaan sehingga menyebabkan tanah longsor dan dapat mengancam jiwa manusia.	
Risiko Bencana Tanah Longsor	Dalam menentukan tingkat risiko bencana tanah longsor dibutuhkan data spasial yang mana berkaitan dengan rumus risiko. Besarnya ancaman dapat dilihat dari seringnya terjadi bencana tanah longsor dan besarnya kerentanan membutuhkan data parameter rekentanan tanah longsor yaitu curah hujan, kelerengan lahan, jenis batuan geologi, penggunaan lahan, infrastruktur jalan, kepadatan penduduk, dan kegempaan. Sedangkan kapasitas dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi bencana. Dengan adanya informasi geospasial mengenai pemetaan kawasan rawan longsor yang disampaikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan memperkecil ancaman dan kerentanan kemudian memperbesar kapasitas.	
Anallisis Geospasial	Pemanfaatan GIS dengan mengolah data spasial melalui analisis overlay	

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

## Lampiran 2. Formulir Wawancara

### **KARAKTERISTIK GEOSPASIAL WILAYAH RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN NGANJUK GUNA MENINGKATKAN SISTEM KEWASPADAAN DINI**

Selama Pagi Bapak/Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Titisari Haruming Tyas, saya mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk kepentingan akademis terkait Karakteristik Geospasial Wilayah Risiko Longsor di Kabupaten Nganjuk Guna Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini.

Pengisian pertanyaan wawancara ini akan memakan waktu sekitar 15-30 menit. Segala bentuk informasi yang terdapat dalam penelitian ini akan saya jamin kerahasiaannya. Jika Bapak/Ibu bersedia menjadi informan, mohon untuk mengisi lembar persetujuan menjadi informan. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Identitas Informan:

Nama : .....

Usia : .....

Jenis kelamin : .....

Profesi : .....

Instansi : .....

Pendidikan Terakhir : .....

No. Hp : .....

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembar ini, saya:

Nama : .....  
Usia : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Memberikan persetujuan untuk menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **Karakteristik Geospasial Wilayah Risiko Longsor di Kabupaten Nganjuk Guna Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini** yang akan dilakukan oleh Titisari Haruming Tyas, mahasiswi Program Studi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan. Saya telah dijelaskan bahwa hasil wawancara ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan saya secara suka rela bersedia menjadi informan penelitian ini.

Nganjuk, ..... 2021

Yang menyatakan,

(.....)

## Jadwal Wawancara

Hari .....

Tanggal : .....

### 1. Karakteristik Geospasial

Nama informan : .....

No	Indikator
1	Tingkat Kerawanan Bencana
a	Bagaimana pemetaan kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Nganjuk?
b	Bagaimana tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Nganjuk?
2	Pengambilan Kebijakan
a	Bagaimana penguatan peraturan daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana?
b	Bagaimana upaya penyusunan peta kerentanan bencana longsor dan pembaharuannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku?
c	Bagaimana penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana?
3	Perencanaan Tata Ruang
a	Bagaimana penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah harus memperhatikan peta risiko bencana di Kabupaten Nganjuk?
b	Bagaimana pemetaan kawasan rawan longsor tidak dapat mengendalikan pembangunan di Kabupaten Nganjuk?

### 2. Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini

Nama informan : .....

No	Indikator
4	Prediksi
a	Apakah pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor menjadi salah satu alat untuk memprediksi munculnya risiko bencana?
b	Apakah sistem kewaspadaan dini masyarakat meningkat dengan adanya prediksi akan adanya bencana tanah longsor?

No	Indikator
5	Interpretasi
a	Apakah pemetaan bencana mempermudah masyarakat memahami risiko bencana tanah longsor yang akan muncul?
b	Apakah peta kerawanan bencana tanah longsor dapat dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk sistem peringatan dini?
6	Respon
a	Bagaimana peringatan dini diberikan kepada masyarakat yang terancam bencana tanah longsor oleh sumber yang dapat dipercaya (misalnya pemerintah, ketua adat, atau organisasi masyarakat)?
b	Bagaimana meningkatnya respon masyarakat tentang risiko bencana alam melalui pemetaan bencana tanah longsor di Kabupaten Nganjuk?
7	Penyebaran dan komunikasi
a	Bagaimana pemerintah menyebarluaskan informasi bencana tanah longsor kepada masyarakat ?
b	Bagaimana pemerintah memanfaatkan media massa atau media alternatif lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Nganjuk?
8	Pengetahuan risiko bencana
a	Apakah tersedia sistem peringatan dini yang dipahami oleh masyarakat dengan memanfaatkan peta risiko bencana tanah longsor?
b	Apakah dilakukan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tanggap bencana untuk masyarakat?
c	Apakah pemetaan wilayah yang rentan terhadap bencana tanah longsor meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana?
9	Kesiapsiagaan
a	Apakah pemanfaatan peta kerawanan bencana tanah longsor dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
b	Bagaimana memanfaatkan pemetaan kawasan rawan bencana longsor untuk membuat strategi kesiapsiagaan dalam menghadapi terulangnya peristiwa bencana?

—Terima Kasihh—

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara

#### A. Transkrip Wawancara Informan 1 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk)

Pewawancara : Titisari Haruming Tyas

Informan 1 : Bapak Nugroho

Pewawancara	: Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Titis mahasiswa UNHAN RI mohon izin untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian saya.
Informan 1	: Iya mbak silahkan.
Pewawancara	: Mohon izin Bapak ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan bencana tanah longsor di Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya kemarin sebenarnya juga sudah wawancara Pak ke beberapa dinas di Nganjuk.
Informan 1	: Sebelumnya sudah wawancara ke dinas mana saja mbak? BMKG?
Pewawancara	: Nggih BMKG Pak.
Informan 1	: Ketemu siapa? Pak Sumber Harto?
Pewawancara	: Nggih ketemu Pak Sumber. Kemudian ke Bappeda, PU.
Informan 1	: PU kan yang mengeluarkan izin bangunan rumah ya. Nah itu yang ga jalan.
Pewawancara	: Sulitnya dibagian apa Pak itu?
Informan 1	: Jadi berawal dari mengurus IMB ya. Terus ada form nya itu, nah tugas PU itukan lihat peta. Wilayahnya rawan atau tidak
Pewawancara	: Ohh tata ruangnya nggih Pak?
Informan 1	: Nah itu, kalau itu sudah OK, baru izin diberikan. Nah itu belum jalan. Jangankan kok di kampung kayak di Ngetos. Di kota aja juga nggak jalan.
Pewawancara	: Jadi tidak apa ya Pak jika itu jadi temuan penelitian saya?
Informan 1	: Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi. Tapi bukan tugasnya BPBD. Karena BPBD itukan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itukan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang des aitu nggak ngreken kalau harus punya izin bangunan. La yaitu mulai sekarang harus di sosialisasikan bahwa izin itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa IMBnya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.
Pewawancara	: Iya pak berarti pemahaman ke masyarakat juga harus ditingkatkan.
Informan 1	: Iya, jadi kalau mau mendirikan bangunan harus tau tanahnya itu rawan gerakan tanah atau tidak. Ini juga untuk keselamatan masyarakat. Jadi ini masih menjadi PR Bersama. Bahkan aku pengen ngundang Badan Geologi untuk ke sini lagi, tak suruh untuk memetakan daerah Ngetos sana. Agar ada zonasi mana yang zona rawan 1.
Pewawancara	: Oh iya bagus juga itu Pak.

Informan 1	: Iya, kalau bisa nanti yang zona rawan 1 jangan ada permukiman. Jadi lihat lokasi yang kemarin di Ngetos itu bukan tempat untuk hunian. Jadi tanah itu udah nyaris 10 derajat.
Pewawancara	: Kemiringannya ya Pak itu?
Informan 1	: Iya. Jadi ituloh susah. Udah di pasang EWS dan sering bunyi, tapi ya gamau pergi masyarakat. Jadi itu kultur ya dari kakek, nenek, buyutnya sudah di sana. Itu tantangannya mitigasi bencana gerakan tanah. Nanti di revisi UU 24 itu ada lagi bencana namanya gerakan tanah. Beda dengan gempa bumi, kalau gempa bumi kan pemicunya bisa karena gunung berapi. Kalau Gerakan tanah itu tidak, pemicunya itu yang ulah manusia. Ngertikan Gerakan tanah itu penyebabnya apa?
Pewawancara	: Air dan kemampuan tanah mungkin ya pak?
Informan 1	: Iya, tata kelola air di kelerengan ekstrem itu tidak bagus. Sehingga airnya itu meresap dan membuat tanah jadi gembur kemudian tanah jatuh.
Pewawancara	: Jadi untuk mitigasi yang sesuai seperti apa Pak baiknya?
Informan 1	: Kata badan Geologi itu di wilayah rawan longsor ini kalau bisa jangan ada aliran air terbuka, bolehnya saluran air tertutup/pipa. Nah di sana ada sungai. Katanya sehebat apapun anda membangun sungai di tempat yang miring-miring itu pasti nanti retak. Kalau retakkan airnya jatuh.
Pewawancara	: Jadi banjir Pak?
Informan 1	: Bukan banjir, tapi meresap ke tanah di atas ada beban bangunan akhirnya jatuh/longsor. Jadi retakan tanah itu karena ulah manusia. Bukan karena gempa saja. Retakan tanah itu bisa diamati kok.
Pewawancara	: Oh, saya juga baru tahu ini Pak mengenai retakan tanah.
Informan 1	: Iya, kemarin saya dikasih tau sama petugas fungsionalnya Badan Geologi. Beliau bilang jika itu ulah kita sendiri. Kemudian yang kedua tentang vegetasi, tanaman apa yang baik untuk ditanam di wilayah risiko longsor.
Pewawancara	: Tanaman seperti apa itu Pak?
Informan 1	: Bukan tanaman seperti apa saja yang harus ditanam. Tapi kita harus tau tanaman yang awal mula tertanam di wilayah itu. Bukan berarti tanaman yang bagus menyerap air cocok ditanam di sana. Misalnya dulunya di wilayah itu tumbuh tanaman jati, y aitu yang harus di lestarikan di sana. La sekarang malah di sana itu banyak tanaman durian yang tidak cocok dengan histori tumbuhan yang ada di sana. Jadi begitu mitigasi untuk mengikat tanah yang paling sesuai memang jenis tumbuhan yang awal mula tumbuh di sana. Nah sampean bisa masukkan ini juga ke penelitian anda.
Pewawancara	: Jadi dinas teknis di Nganjuk juga belum paham hal ini ya Pak?
Informan 1	: Iya, dulu saja saya dipanggil ke dewan kenapa bisa kejadian seperti ini. Ya ini nggak enakya di BPBD baru ditanyai dan kejadian jadi berubah sangat penting. Padahal itu bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Kemarin itu lumayan ada 19 orang yang meninggal. La di Luwu kemarin Cuma berapa itu 4/5 saja. Nah baru panik, siapa yang salah. Nggak enakya itu, padahal kita sudah teriak-teriak dari awal. Kita butuh anggaran untuk ini itu tidak dikasih. Ya kalau mengandalkan partisipasi masyarakat desa itu mimpi. Jadi harus pemerintah karena itu urusan wajib.
Pewawancara	: Benar juga Pak. Tugas BPBD jadinya seperti apa Pak?
Informan 1	: Jadi tugas BPBD itu untuk menyelenggarakan urusan wajib yaitu perlindungan kepada masyarakat sub urusan bencana. Nah tapi

	diabaikan karena pola pikir <i>sok ae lek wes kedadean lagek dipikir</i> , akhirnya kan repot itu.
Pewawancara	: Akhirnya priapun Pak masyarakat yang terdampak ada di lokasi kejadian mau direlokasi atau tidak?
Informan 1	: Mau, ya sama masyarakat pun berpikinya seperti itu. Disosialisasi susah, dibilangi kalau ini itu nggak layak untuk hunian ya susah, ya alasannya punyanya ya itu. Akhirnya setelah kejadian jadi nurut. Sekarang pertanyaannya di balik, jadi perlu kejadian dulu ya..ya monggo.
Pewawancara	: Enggak pak harusnya
Informan 1	: Iya, harusnya tidak. Kalau harus terjadi dulu itu Namanya tidak melindungi. Melindungi itu kan lebih banyak ke mencegah. Di sini tempatnya di bidang pencegahan. Kalau saat darurat itu lebih mudah. Malah saat evakuasi korban longsor tenaga yang ada <i>overload</i> . Kalau ditanya apa yang dibutuhkan, pastinya pemahaman masyarakat tapi susah.
Pewawancara	: Memang Pak. Paling susah itu membentuk kesadaran masyarakat terhadap bencana agar mengurangi risiko bencana.
Informan 1	: La iya itu, urusan risiko bagi mereka itu dinomor belakangan. Bahkan bukan hanya warga situ yang panik, desa sebelah juga ikut panik. Tidak ada kejadian minta diungsikan dan direlokasi.
Pewawancara	: Itu desa mana Pak?
Informan 1	: Yang kejadian kan Desa Ngetos Dsn. Selopuro. Nah yang panik itu desa sebelahnya yaitu Desa Kepel terutama Dsn. Burikan. Sebelahnya lagi agak naik dikit Desa Margopatut. Itu panik mereka ngungsi mandiri. Kita nggak bisa nganggarkan karena tidak ada tanggap daruratnya. Baru mereka panik akhirnya pas Badan Geologi ke sini tak suruh cek lokasi-lokasi itu. Ternyata juga lokasi relokasi warga itu berada di hutan. Untung saat dicek lokasi aman, kemiringannya tidak terlalu, dan seterusnya. Jadi ada fenomena sosialnya. Tidak hanya tentang geologinya.
Pewawancara	: Iya Pak, yang paling susah dikontrol itu sosial masyarakatnya.
Informan 1	: Iya pasti itu, budaya kita yang <i>mangan ra mangan kumpul</i> itu, terus ini ada maka leluhur saya di sini. Alasan ekonomi juga, duren di sana mahal mbak.
Pewawancara	: Iya benar Pak
Informan 1	: Kita itu setengah-setengah kalau bertindak. Mikirnya itu yang penting pindah dulu nanti yang lain dipikir belakangan. Kan kayak gitu tidak bisa. Jadi posisi hari ini Selopuro itu 48 rumah yang berpenghuni harus meninggalkan rumah itu. Disarankan untuk disebar di rumah-rumah penduduk. Kemudian kita masih proses sama BNPB dan Kemenko PMK untuk relokasi. Ternyata ada kendala yaitu tanah yang dibuat relokasi itu milik Perhutani. Prosesnya ternyata panjang. Harus melepaskan fungsi hutan dulu jadi hak milik. Sampai hari ini belum keluar izinnya. Nanti kalau izinnya keluar itu nanti ada dua alternative yaitu pertama dikasih stimulan untuk membangun rumah atau dibuatkan rumah mereka tinggal menempati.
Pewawancara	: Jadi antara mereka membangun sendiri sama dibuatkan rumah ya Pak?
Informan 1	: Iya kalau stimulant mereka membuat sendiri, jadi dibentuk POKMAS nanti uang ditransfer ke mereka terus mereka bisa ambil bahan dari rumah lama kayak kayu dan lain-lain terus uang beli semen bisa dari uang yang di transfer. Kemudian statement kedua itu disampaikan oleh Kemenko PMK akan dibuatkan rumah-rumah petak yang

	membangun nanti Kementerian PUPR. Nanti mereka mau ke sini milih opsi yang stimulant atau dibuatkan rumah. Tapi ini urusan tanahnya belum selesai jadi terhambat. Sampai saat ini baru sampai tahap pemetaan lokasi relokasi mengenai batas-batas wilayahnya dengan luas 4,5 Ha terdiri dari 48 rumah untuk 189 jiwa 58 KK. Nanti nunggu izin Gubernurnya keluar. Terus apa lagi mbak?
Pewawancara	: Jadi untuk pemetaan Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Nganjuk sebenarnya sudah dilakukan ya Pak?
Informan 1	: Sudah dari Kementerian ESDM tapi ini sudah lama. Tapi ini peta Gerakan tanah ya bukan peta longsor. Kalau untuk longsor kita pakai kajian risiko dan posisi hari ini dokumennya sedang update atau diperbaharui karena ada kejadian baru.
Pewawancara	: Oh yang bareng dengan PUSPPITA itu nggih Pak?
Informan 1	: Iya bener mbak.
Pewawancara	: Kemudian berkaitan dengan pengambilan kebijakan kebencanaan di Kabupaten Nganjuk seperti apa Pak?
Informan 1	: Oh tentang peraturan daerah ya, itu yang tak bilang. Kita sendiri (pemerintah daerah) itu menggampangkan perkara bencana. Sampai hari ini Nganjuk itu belum punya PERDA Penanggulangan Bencana.
Pewawancara	: Kemudian bekerjanya bagaimana Pak?
Informan 1	: Tetap bisa kerja pakai pedoman dari pusat. Jadi selama ini kita bekerja berdasarkan Peraturan Kepala BNPB dan aturan di atasnya. Kalau keuangan di Peraturan KEMENDAGRI. Kemudian ada SPM (Standar Pelayanan Minimal) sub urusan bencana itu di PERMENDAGRI.
Pewawancara	: Berarti untuk penganggaran sendiri tidak ada masalah nggih Pak?
Informan 1	: Tidak ada tapi kurang maksimal. Kita ini seperti anak tiri. Lebih besar anggaran di PU, tidak apa sebenarnya lebih besar di PU asal tolong diperhatikan bekas kejadian bencana itu diperhatikan. Seharusnya itu menjadi prioritas di atas prioritas pembangunan daerah. Contohnya tanggul jebol ya harus segera dibenahi, nanti kalau tidak segera dibenahi kemudian sungai penuh lagi nanti dampaknya ke petani. Kembali lagi kesejahteraan. Tapi mereka tidak berpikir sejauh itu akhirnya kalau kejadian teriak-teriak menyalahkan BPBD. Padahal kita sudah memberitahu sejak awal. Jadi terkesan kita yang bodoh dalam menangani bencana. Urusan wajib melindungi masyarakat tapi actionnya tidak sejauh itu.
Pewawancara	: Kemudian bagaimana penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayahnya Pak? Apakah memperhatikan risiko bencana di Kabupaten Nganjuk?
Informan 1	: Sudah ada, tetapi saat menyusun rencana pembangunan tidak diperhatikan. Tak kasih contoh tadi di Ds. Margopatut itu lokasinya di atas gunung, di situ mau dibangun bendungan tanpa memperhatikan peta rawan bencana. Padahal di tata ruangnya sudah bilang daerah itu risiko tinggi.
Pewawancara	: Itu rencana dari mana Pak?
Informan 1	: Itu dari Kabupaten dari BAPPEDA. Karena Bupati yang minta juga.
Pewawancara	: BAPPEDA sendiri padahal sudah punya peta risiko ya Pak tapi kok tetap merencanakan itu ya Pak?
Informan 1	: La iya itu, padahal kajian teknisnya itu tidak bisa karena tanahnya itu lentur. Seperti kita naruh bak kalau airnya itu penuh bisa guling atau pecah. Jadi itu kurang ke bawah lokasinya. Nah padahal

	BAPPEDA kan sudah buat tata ruang dan berbasis kajian risiko. Ada Namanya di KLHS di dalamnya ada bencananya.
Pewawancara	: Kemudian apakah pemetaan Kawasan longsor dapat mengendalikan pembangunan di Kabupaten Nganjuk?
Informan 1	: Nah itu di Perda RTRW sudah disebutkan wilayah rawan longsor itu kecamatan mana saja. Tapi ya tulisan tinggal tulisan. Waktu mengambil kebijakan tidak pernah diperhatikan.
Pewawancara	: Ohh seperti itu pak, lalu berkaitan dengan sistem kewaspadaan dini di Kawasan rawan bencana longsor Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk prediksi terhadap bencana seperti apa pak?
Informan 1	: Jadi di wilayah yang kemarin longsor itu sudah ada Early Warning Systemnya untuk prediksi bencana berupa alat dan sistem. Jadi Early Warning System itu kan alat dan sistem ya. Kalau alatnya bunyi apa yang Anda lakukan. Pada saat itu kejadian longsor terjadi waktu magrib, pas waktu orang-orang terlina atau pada ke masjid. Nah ditambah frekuensi simulasinya ini yang masih kurang sehingga tidak tertanam di otak bawah sadarnya masyarakat.
Pewawancara	: Oh di wilayah risiko longsor apakah ada pos pemantauan Pak?
Informan 1	: Kalau untuk pemantauan di sana itu sudah Desa Tangguh Bencana. Jadi sudah ada Forum Pengurangan Risiko dan Tim Relawan. Jadi BPBD disalahkan ya tidak bisa karena itu sudah kita lakukan semua. Dan bencana itu kan segitiga yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran sama juga bohong. Mungkin kalau suaranya diganti seperti suara kaleng cat akan lebih waspada, kalau suaranya seperti sirine nanti dikiranya suara ambulance. Suara sirine itu ternyata juga berpengaruh ternyata.
Pewawancara	: Jadi sebenarnya di sana sudah Desa Tangguh Bencana ya Pak? Hanya saja masyarakatnya masih belum begitu waspada terhadap peringatan?
Informan 1	: Iya desa-desa yang ada di atas itu sudah Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Terus update cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang tidak punya kesadaran terhadap bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua alatnya itu diganti dengan yang lebih mengena. Suaranya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau <i>genduren/slametan</i> . Kalau untuk tanda bahaya masih diabaikan oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau sama masyarakat cuma dianggap hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.
Pewawancara	: Kemudian untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai peta risiko bencana apakah sudah di lakukan Pak?
Informan 1	: Sudah, sosialisasi pada saat pembentukan Destana itu sudah dilakukan. Kegiatan pertama itu pasti mengenali ancaman dan potensi untuk menghadapinya. Kalau mengungsi itu nanti ke mana itu sudah dilakukan. Kita mengumpulkan 30 orang yang nantinya

	mereka diberikan tugas untuk menyampaikan/sosialisasi ke masyarakat di forum pengajian, dan lainnya. Kemudian yang di tempat kejadian longsor kemarin itu sama <i>kamituwo</i> sudah dikasih tau juga. Kesimpulannya masyarakat mau tidak menyadari kalau ini penting.
Pewawancara	: Ada tidak Pak monitoring dan evaluasi untuk forum pengurangan risiko bencana ternyata masyarakatnya kurang dalam hal tertentu?
Informan 1	: Nah gini, setiap tahun dana desa itu kan ada yang untuk penanggulangan bencana. Di Selopuro itu minta anggaran ke Pak Lurah untuk sosialisasi ke masyarakat dan itu sudah dilakukan. Cuma tadi itu loh waktu terjadinya bencana pas magrib dan kesadaran masyarakat kurang. Kalau kayak gini kejadian lagi pasti udah sadar karena sudah kejadian.
Pewawancara	: Iya pak betul harus kejadian dulu baru sadar biasanya seperti itu pak. Pada seharusnya tidak seperti itu.
Informan 1	: Nah pemerintah juga mikirnya seperti itu dan masyarakat juga menyepelekan. Kita juga pernah mengajak masyarakat di wilayah risiko longsor itu untuk studi banding ke Bantul. Sudah dapat ilmu di sana tapi ya gitu, saat di desa tidak diterapkan. Simulasi itu harus dilakukan periodik/ berkala jangan setahun sekali. Kalau rutin kan ada yang terjadwal dan tidak terjadwal.
Pewawancara	: Berarti responnya sudah diberikan seperti peringatan dini kepada masyarakat yang terancam bencana misalnya dari pemerintah, ketua adat atau organisasi masyarakat?
Informan 1	: Sudah, nanti kalau perlu ketemu <i>kamituwo</i> pasti jawabannya sama kayak aku.
Pewawancara	: Berarti untuk penyebaran dan komunikasi bencana tanah longsor ke masyarakat sudah dilakukan juga ya Pak?
Informan 1	: Sudah dilakukan penyebaran dan komunikasi. Nah itu KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) itu sama KEMENDAGRI ditaruh di nomor 1 karena itu barang penting. Nah tentang apakah pemetaan itu mempermudah atau tidak? Ya sebenarnya harusnya mempermudah, jadi saat pembentukan itu kita kasih tau daerah anda ini rawan longsor menurut pemetaan Kawasan rawan bencana longsor.
Pewawancara	: Kalau untuk pemanfaatan media massa atau media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan public terhadap risiko longsor di Kabupaten Nganjuk seperti apa Pak?
Informan 1	: Sudah jadi kita punya <i>WhatsApps Group</i> untuk menyebarkan informasi ke desa rawan bencana. Terus informasi itu kita dapatkan dari BMKG baik dari Juanda maupun Sawahan. Kalau lagi musim hujan kayak kemarin itu informasinya diperbaharui satu jam sekali. Kita juga bikin jaringan sama orang pengairan. Kalau DAM ini sudah ketinggian sekian yang bawah ini siap banjir harus evakuasi. Kemarin itu sebenarnya juga sudah jelas sosialisasinya kalau saat banjir segera evakuasi nanti jika sudah berhenti 1-2 jam baru boleh kembali. Terus kemarin itu saya juga sudah coba interview beberapa orang sebenarnya terasa tidak kalau mau ada kejadian. Mereka bilang sebenarnya juga terasa karena hujannya lama. Tapi pemikiran mereka yang meremehkan.
Pewawancara	: Nah iya pak biasanya orang itu kapok kalau sudah kejadian Pak.
Informan 1	: Nah itu loh, unik memang masyarakat ini.
Pewawancara	: Kalau untuk pengetahuan risiko bencana apakah sudah dilaksanakan Pendidikan tanggap bencana untuk masyarakat Pak?

Informan 1	: Ada Namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi Desa Tangguh paling lengkap. Desa Tangguh itu wajib sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di desa itu. Ya sama yang disampaikan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Kita juga melatih PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat). Bagaimana mengatasi orang patah tulang dan luka terbuka. Pokoknya paling lengkap Desa Tangguh itu, tinggal mau bergerak atau tidak.
Pewawancara	: Kemudian apakah memanfaatkan peta kerawanan bencana tanah longsor dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
Informan 1	: Iya pasti dan sudah di lakukan. Jadi kita tunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak peduli juga susah. Jadi kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu kesadaran masyarakat kurang, kearifan lokal belum dimanfaatkan, regulasi lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.
Pewawancara	: Ohh.. saat ini belum ada penyusunan PERDA Penanggulangan Bencana Pak?
Informan 1	: Saat ini sudah diinisiatif dewan setelah ada kejadian longsor itu. Karena mendesak juga akhirnya RAPERDA disetujui. Saya sampaikan juga ke dewan kalau PERDA itu untuk mengikat masyarakat dan pemerintah. Jadi itu harus disetujui agar masyarakat mau terlibat. Akhirnya kemarin itu bergerak dan mulai minta data awal. Kemudian pengarusutamaan itu kan apa yang nanti diutamakan contohnya pakai peta risiko bencana untuk memberikan izin dan lainnya.
Pewawancara	: Baik pak, jadi memang pada intinya empat hal tersebut yang paling utama untuk ditingkatkan ya Pak.
Informan 1	: Iya mbak untuk mengurangi risiko bencana empat hal itu sangat penting.
Pewawancara	: Baik pak terima kasih atas informasi yang diberikan. Selamat siang Pak.
Informan 1	: Iya sama-sama mbak. Semoga lancar thesisnya.

## **B. Transkrip Wawancara Informan 2 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk)**

Pewawancara : Titisari Haruming Tyas

Informan 2 : Bapak Eko Wahyudi

Pewawancara	: Perkenalkan Bapak, saya Titis mahasiswa S2 UNHAN RI. Judul saya yaitu berkaitan dengan karakteristik geospasial wilayah risiko longsor di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini. Tujuan saya untuk wawancara dengan pihak BAPPEDA itu berkaitan dengan tata ruang dan juga setahu saya direncanakan tata ruang itu ada peta kerawanan bencana. Nah ini mau
-------------	---

	wawancara mengenai upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan BAPPEDA untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini masyarakat dari sisi tata ruangnya.
Informan 2	: Iya silahkan mbak.
Pewawancara	: Baik Pak, pertama berkaitan dengan tingkat kerawanan bencana, bagaimana pemetaan Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Nganjuk Pak?
Informan 2	: Bencana tanah longsor itu, kalau di Nganjuk itu ada bencana tanah longsor, banjir, dan bencana gunung api. Terus kalau dalam tata ruang itu kita sudah merencanakan ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) baik peta maupun di batang tubuh pada indikasi programnya. Terus di RTRW itu juga direncanakan titik evakuasi dan jalur evakuasi. Memang substansinya di RTRW harus seperti itu.
Pewawancara	: Kalau untuk lokasinya sendiri mengenai titik evakuasi dan jalur evakuasinya di mana Pak?
Informan 2	: Nanti yang titik evakuasi dan jalur evakuasi kami kasih petanya.
Pewawancara	: Baik Pak, kemudian bagaimana tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Nganjuk?
Informan 2	: Iya ada risiko tinggi, kan kalau kerentanan risiko itu kan dari curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah itu ya. Kita klasifikasikan tinggi, sedang, rendah.
Pewawancara	: Kalau untuk penggunaan lahannya di wilayah lereng gunung wilis itu apa ya Pak?
Informan 2	: Sebagian besar di sana itu untuk hutan lindung dan hutan produksi.
Pewawancara	: Ada tidak Pak seperti penyalahgunaan penggunaan lahan di daerah rawan longsor?
Informan 2	: Ada seperti kemarin itu kejadian di Selopuro itu jadi sudah ada permukiman di Kawasan rawan bencananya. Jadi ketikan terjadi longSORan ya memang sudah risikonya.
Pewawancara	: Kemudian upaya dari pemerintah Kabupaten Nganjuk itu seperti apa Pak berkaitan dengan kasus seperti itu?
Informan 2	: Jadi gini ya ini kan kami ditataran perencanaan ya, nah nanti masih ada mitigasi di perencanaan, saat kejadian, dan rehab rekon. Nah dua hal terakhir ini di BPBD. Mereka sudah membuat Desa Tanggap Bencana.
Pewawancara	: Kalau untuk penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang saat ini apakah masih berlaku atau sedang revisi?
Informan 2	: Ini sedang revisi, PERDANYa No 2 Tahun 2011 ini sedang revisi sudah selesai evaluasi gubernur.
Pewawancara	: Kemudian bagaimana upaya dari BAPPEDA dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini masyarakat?
Informan 2	: Kalau BAPPEDA memang dari segi tata ruangnya. Jadi jika ada yang mengajukan izin kita overlay kan dengan peta kerawanan bencana. Kalau misal lokasinya masuk di lindung atau rawan bencana tinggi ya kita tolak.
Pewawancara	: Jadi untuk pengajuan izin ke BAPPEDA ya Pak?
Informan 2	: Pengajuan izin itu kan ke DPMPSTSP, peran dari BAPPEDA itu sebagai salah satu anggota tim pemberi izin membangun.
Pewawancara	: Kemudian bagaimana peran dari pemetaan Kawasan rawan bencana tanah longsor menjadi alat prediksi munculnya risiko bencana Pak?

Informan 2	: nah BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan Kawasan rawan bencana. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai alat prediksi munculnya risiko bencana.
Pewawancara	: Baik pak. Lalu bagaimana koordinasi antar dinas di Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi bencana tanah longsor yang kemarin terjadi di Ngetos itu Pak? Kemudian peran dari BAPPEDA sendiri seperti apa Pak?
Informan 2	: Kalau ketika kejadian itu <i>leading sector</i> ada di BPBD. Kemudian BAPPEDA itu masuk pada penganggaran belanja tidak terduga. Kalau di lapangannya semua OPD ikut. Spesifiknya untuk BAPPEDA terkait dengan penganggaran
Pewawancara	: Jadi bisa ya Pak, melakukan perubahan anggaran ketika terjadi bencana?
Informan 2	: Tidak harus melalui perubahan anggaran karena Belanja Tidak Tetap itu memang dianggarkan untuk situasi tidak terduga. Ketika sudah dikeluarkan surat kedaruratan dari Bupati itu sudah bisa menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Tetap tanpa harus menunggu perubahan anggaran.
Pewawancara	: Oh berarti memang ada anggaran khusus untuk kejadian tidak terduga ya Pak. Kalau untuk anggarannya sendiri berada di BAPPEDA atau di BPBD Pak?
Informan 2	: Kalau anggarannya itu di BPPKAD Nganjuk, tetapi nanti pengajuannya kebutuhan anggaran oleh BPBD.
Pewawancara	: Kalau dari BAPPEDA perannya memberikan persetujuan atau bagaimana Pak?
Informan 2	: BAPPEDA sebagai tim anggaran itu yang nanti mengkaji RAB nya dan menentukan jumlah yang sesuai.
Pewawancara	: Berarti peran BAPPEDA dalam kebencanaan itu dari sisi penganggaran dan tata ruangnya ya Pak. Kemudian ada kegiatan Bersama OPD lain di Kabupaten Nganjuk tidak Pak yang berkaitan dengan kebencanaan?
Informan 2	: Pasti ada, mulai dari kejadian sampai rehab rekon itu terus dilakukan dengan kerjasama tim.
Pewawancara	: Kemudian berkaitan dengan pengetahuan risiko bencana dari masyarakat, apakah BAPPEDA ikut dalam memberikan Pendidikan tanggap bencana untuk masyarakat Pak?
Informan 2	: Kalau pemberian pengetahuan risiko bencana itu peran dari BPBD termasuk nanti mereka itu membuat Desa Tanggap Bencana. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui relawan itu mengenai risiko bencana.
Pewawancara	: Oh baik Pak. Kemudian bagaimana cara BAPPEDA untuk melakukan penyebaran dan komunikasi terhadap informasi kebencanaan kepada masyarakat? Apakah ada website tertentu yang dibuat oleh pemerintah yang berisikan peta tata ruang misalnya?
Informan 2	: Oh iya ada untuk penyebaran dan komunikasi terhadap informasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Itu tahun ini memang berbentuk <i>web base</i> dan <i>android base</i> . Tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di <i>overlay</i>

Pewawancara	: Berarti untuk kedepannya, pemberian izin membangun bisa dilihat dari situs SITARUNA ya Pak? Apakah lokasinya dapat diberikan izin atau tidak?
Informan 2	: Iya benar nantinya bisa dilakukan secara mandiri. Ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau dari <i>prototipe</i> nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan hasil dizinkan atau tidak untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak dizinkan. Nanti bisa keluar by system.
Pewawancara	: Oh baik pak. Kalau untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) apakah sudah ada Pak?
Informan 2	: Kalau RDTR yang PERBUP belum ada sama sekali. Ini dibuat oleh Dinas PU.
Pewawancara	: Oh berarti ini masih proses penyusunan RDTR Pak?
Informan 2	: Iya ini sekarang masih proses RAPERBUP dan proses persetujuan substansi.
Pewawancara	: Jadi dokumennya belum ada Pak?
Informan 2	: Kalau dokumen ada tapi masih sampai Materi Teknis dan RAPERBUP. Hanya saja kalau sudah di undangkan itu belum ada.
Pewawancara	: Kemudian Pak, berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat, apakah pemanfaatan peta kerawanan bencana tanah longsor dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
Informan 2	: Seharusnya bisa, karena fungsi dari pemetaan kerawanan bencana itu agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana. Namun memang edukasi dan pemahaman masyarakat itu masih kurang. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang praktek langsung di lapangan. Selama ini kendala itu memang di sosial masyarakatnya. Karena menyadarkan masyarakat itu susah juga.
Pewawancara	: Baik pak, saya rasa pertanyaan yang berkaitan dengan peran BAPPEDA sudah saya tanyakan seluruhnya. Berkaitan dengan data-data yang saya minta apakah bisa dicopykan Pak?
Informan 2	: Iya bisa mbak.
Pewawancara	: Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber saya.
Informan 2	: Sama-sama mbak. Semoga lancar thesisnya ya.

### C. Transkrip Wawancara Informan 3 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nganjuk)

Pewawancara : Titisari Haruming Tyas

Informan 3 : Ibu Luluk Listiana

Pewawancara	: Perkenalkan Bu, saya Titis mahasiswa S2 UNHAN RI. Mohon izin mengganggu waktu Ibu untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian saya. Saya mengambil judul berkaitan dengan karakteristik geospasial wilayah risiko longsor di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini.
Informan 3	: Iya silahkan mbak. Apa yang ingin ditanyakan.
Pewawancara	: Baik Bu, pertama hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tingkat kerawanan bencana, bagaimana pemetaan Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Nganjuk Pak?

Informan 3	: Jadi mbak, kita sudah buat Peta Kawasan Risiko Bencana untuk tau tingkat kerawanan bencana di Nganjuk. Tapi saat ini file-file itu masih dipegang oleh BAPPEDA. Karena belum diserahkan ke PU. Saat ini masih proses pengesahan RTRW jadi masih dipegang BAPPEDA.
Pewawancara	: Oh baik bu, tapi Dinas PU tetap ikut andil dalam proses penyusunan dokumennya Bu?
Informan 3	: Iya PU juga selalu diundang dalam proses penyusunan dokumen mbak. Kita tetap koordinasi biar nanti saat serah terima kita juga tau perkembangannya seperti apa.
Pewawancara	: Kemudian kalau berkaitan dengan pengambilan kebijakan Bu, dari PU sendiri bagaimana upaya untuk penguatan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencananya?
Informan 3	: Kalau untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.
Pewawancara	: Oh seperti itu, berarti untuk perencanaan tata ruang PU masih menunggu serah terima dari BAPPEDA ya Bu. Kalau saat ini penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) apakah memperhatikan peta risiko bencana di Kabupaten Nganjuk Bu?
Informan 3	: Iya pasti mbak. Di Rencana Tata Ruang Wilayah itu memuat Peta Kawasan Risiko Bencana juga. Ada bencana tanah longsor, banjir, dan gunung api kalau tidak salah ya.
Pewawancara	: Berarti pemetaan Kawasan rawan bencana khususnya longsor di Rencana Tata Ruang Wilayah itu harusnya bisa menjadi pengendalian pembangunan di Kabupaten Nganjuk ya Bu?
Informan 3	: Iya seharusnya itu termasuk instrument penting dalam pengendalian pembangunan. Tapi ya saat ini banyak orang-orang yang membangun tanpa izin. Tidak mengurus izin membangun. Padahal mereka harus tahu apakah lahan mereka itu rawan bencana atau tidak.
Pewawancara	: Iya betul Bu. Jadi bisa dibilang jika pemetaan Kawasan rawan bencana khususnya tanah longsor ya bu itu menjadi alat untuk memprediksi munculnya risiko bencana ya?
Informan 3	: Iya benar, kalau prediksi dengan pemetaan Kawasan rawan bencana itu diremehkan dan dianggap tidak penting ya bencana seperti kemarin di Ngetos Selopuro itu pasti bisa terjadi lagi mbak.
Pewawancara	: Kemudian apakah pemetaan bencana itu dapat diinterpretasikan secara mudah oleh masyarakat sebagai bentuk dari sistem peringatan dini Bu?
Informan 3	: Kalau hal teknis seperti ini yang lebih tahu sebenarnya BPBD ya karena BPBD yang punya DESTANA dan tim relawan gitu. Tapi kalau untuk interpretasi atau pemahaman dari masyarakat mengenai pemetaan bencana sebagai bentuk sistem peringatan dini itu belum. Karena nyatanya masih ada aja korban dari bencana kemarin contohnya di Ngetos itu ada 19 orang meninggal akibat tanah longsor. Jadi interpretasi masyarakat itu ya kurang tentang risiko bencana.

Pewawancara	: Oh berarti perlu adanya sosialisasi secara berkala ya bu agar masyarakat bisa paham tentang risiko bencana. Kalau pemerintah sendiri apakah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk respon dalam peringatan dini terhadap bencana khususnya bencana tanah longsor Bu?
Informan 3	: Kalau untuk sosialisasi sebagai upaya membentuk respon masyarakat sudah sering dilakukan setiap tahun ya harusnya oleh BPBD. Karena yang memiliki peran itu di BPBD. Nanti coba wawancara lebih mendalam ke BPBD mengenai membentuk respon masyarakat ini ya.
Pewawancara	: Oh baik bu, kalau upaya untuk penyebaran informasi dan komunikasi kemasyarakat apakah sudah dilakukan oleh pemerintah? Misalnya melalui media massa bahwa ada risiko bencana tanah longsor di Nganjuk seperti itu?
Informan 3	: Kalau pemberitahuan atau penyebaran informasi dan komunikasi itu pasti sebelumnya sudah dilakukan seperti dari BPBD dan BMKG ya sering ngasih berita curah hujan terus ada peringatan dini kalau hujan lebat seperti itu. Tapi kalau hal itu dianggap biasa saja oleh masyarakat dan masyarakat tidak waspada ya kemungkinan terjadi bencana dan menimbulkan risiko besar akan terjadi. Sejauh ini PU hanya bertugas untuk masalah pembangunan sarana dan prasarana ya. Seperti pembangunan drainase gitu. Kalau untuk penyebaran informasi dan komunikasi lebih ke BPBD dan BMKG.
Pewawancara	: Baik bu, berarti PU tugasnya lebih ke membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan ya. Kemudian jika berkaitan dengan pengetahuan risiko bencana oleh masyarakat itu seperti apa bu? Apakah sudah ada sistem peringatan dini yang dipahami oleh masyarakat untuk bencana tanah longsor?
Informan 3	: Sistem peringatan dini untuk mengetahui risiko bencana itu yang lebih tau di BPBD ya mbak. Kalau sejauh ini PU itu bergerak di sebelum bencana misalnya membangun gorong-gorong kemudian saat bencana itu misalnya jembatan atau jalan terputus dari PU harus membangun jembatan atau jalan darurat agar akses tidak terputus.
Pewawancara	: Oh kalau untuk memberikan Pendidikan tanggap bencana kepada masyarakat apakah PU ikut andil juga Bu?
Informan 3	: Pemberian Pendidikan tanggap bencana itu biasanya dilakukan oleh BPBD. Karena yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap bencana. PU hanya mendukung mengenai pembangunan mbak.
Pewawancara	: Baik bu, kemudian berkaitan dengan kesiapsiagaan apakah pemanfaatan peta kerawanan bencana khususnya tanah longsor itu dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
Informan 3	: Iya seharusnya peta kerawanan bencana itu bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat ya dalam menghadapi bencana ini juga menjadi sangat penting khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gunung wilis sana. Itu di sana kan rawan longsor jadi pemahaman tentang lokasi mana saja yang rawan longsor dan apa yang harus dilakukan itu perlu. Itu jadi tugas pemerintah juga agar masyarakat bisa paham dan kesiapsiagaan masyarakat itu meningkat. Pada intinya kerja sama dari berbagai pihak ya tidak bisa hanya satu pihak yang berusaha. Nanti tidak bisa maksimal.

Pewawancara	: Setuju ibu kerja sama multi pihak itu memang sangat diperlukan. Baik dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media massa juga penting dalam menyampaikan informasi.
Informan 3	: Nah iya mbak benar..
Pewawancara	: Baik itu saya rasa cukup menjawab seluruh pertanyaan penelitian saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber saya Bu.
Informan 3	: Iya sama-sama mbak. Semoga lancer yaa.
Pewawancara	: Amin terima kasih Ibu.

#### **D. Transkrip Wawancara Informan 4 (Stasiun Kelas III Geofisika Kabupaten Nganjuk)**

Pewawancara : Titisari Haruming Tyas

Informan 4 : Bapak Sumber Harto

Pewawancara	: Selamat pagi Bapak. Perkenalkan Bapak, saya Titis mahasiswa S2 UNHAN RI. Mohon izin mengganggu waktu Bapak untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian saya. Saya mengambil judul berkaitan dengan karakteristik geospasial wilayah risiko longsor di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini.
Informan 4	: Oh iya berarti tentang karakteristik yang berkaitan dengan tanah longsor ya?
Pewawancara	: Iya benar pak
Informan 4	: Kalau untuk curah hujan itu dipengaruhi juga oleh topografi ya. Indonesia yang bergunung-gunung ini sangat berpengaruh terhadap curah hujan. Terus untuk curah hujan di Nganjuk itu rata-rata menengah sampai tinggi. Tapi ini padatahun-tahun tertentu. Khusus untuk longsor kemarin itu memang curah hujan itu agak tinggi sampai 130 mm. Sehingga dengan curah hujan tinggi dan topografi yang berbentuk gunung atau lereng-lereng sangat terjal itulah yang menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor. Itu kan hujan turun kemudian air terserap oleh tanah kemudian beban tanah semakin berat. Kemiringan tanah yang lebih dari 45 derajat ketika dia menerima beban berat dari air pada bidang gelincir itu akhirnya jatuh.
Pewawancara	: Kalau untuk kasus yang terakhir kemarin di Ngetos itu Pak, apakah penyebabnya dari curah hujan yang sangat berpengaruh atau bagaimana pak?
Informan 4	: Yaitu dua hal itu sama-sama berpengaruh. Karena intensitas hujan tinggi dan terjadi sangat lama itu pertama yang berpotensi adalah longsor. Jadi air masuk dan tersimpan di tanah. Sedangkan tanah itu jenisnya alluvial. Nah jenis tanah ini kalau terkena air jadi gembur atau seperti lumpur. Sedangkan tanah asli yang berada di lapisan bawahnya itu keras sehingga menyebabkan tanah di atasnya mudah jatuh. Itu terjadi kebanyakan di kemiringan yang lebih dari 45 derajat.
Pewawancara	: Kemudian karakteristik kegempaan di Nganjuk sendiri seperti apa Pak?
Informan 4	: Kalau gempa itu kan skalanya beda-beda ya. Gempa ini di Nganjuk ada beberapa sesar yang masih belum terpetakan tapi kemungkinan itu sesar. Contohnya yang di Nganjuk itu yang dari sesar kendeng yang sampai Mojokerto-Surabaya itu, sesar itu yang

	mempengaruhi potensi gempa di Nganjuk. Tetapi walaupun ada sesar, gempa di Nganjuk itu tidak besar tidak sampai 7 magnitudo. Namun karena sesar itu berada di darat walaupun kecil itu merusak.
Pewawancara	: Oh berarti lebih berbahaya sesar di darat ya Pak dari pada sesar di laut?
Informan 4	: Iya sesar-sesar di darat itu pecah otomatis kan banyak perumahan yang terdampak. Kalau di laut kan tidak ada yang terdampak, cuman kalau besar itu menimbulkan tsunami. Ini ada kejadian di Madiun sebelah utara, nah rumahnya itu di lewati sesar akhirnya terbelah padahal konstruksinya bagus. Untung itu konstruksinya bagus kalau tidak bagus rumah itu hancur.
Pewawancara	: Kemudian upaya BMKG sendiri untuk memberikan peringatan diri kepada masyarakat akan ancaman bencana tanah longsor agar respon masyarakat meningkat seperti apa Pak?
Informan 4	: Kalau peringatan dini di bidang meteorologi itu ada tiga yaitu cuaca, maritim, dan klimatologi. Untuk maritim itu khusus memberikan informasi peringatan dini gelombang laut, kecepatan angin, rob, dan ketinggian gelombang laut. Dan itu di sampaikan tergantung lamanya kajian kita biasanya 1-3 hari.
Pewawancara	: Itu datanya real time ya Pak?
Informan 4	: Iya real time Cuma kan dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga menampilkan arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Itu datanya dari radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebar lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa memberikan informasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.
Pewawancara	: Kemudian manfaatnya sendiri Pak, sebelum adanya pemanfaatan karakteristik geospasial seperti itu kepada masyarakat perbedaannya seperti apa Pak? Apakah respon masyarakat meningkat dengan adanya peringatan dini terhadap risiko bencana?
Informan 4	: Jadi gini peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirny rugi. Kalau klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim). Sekolah lapang itu ada untuk

	para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan risiko bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian.
Pewawancara	: Kemudian kalau untuk menentukan tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Nganjuk itu pemetaan kawasannya seperti apa Pak?
Informan 4	: Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya memberikan informasi atau data mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya petanya itu ESDM. Kita hanya menginformasikan curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya petanya itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu penyebaran dan komunikasi terhadap informasi yang kita miliki misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.
Pewawancara	: Lalu bentuk koordinasi antar instansi seperti apa Pak dalam memberikan peringatan dini ke masyarakat khususnya ini berkaitan juga dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah?
Informan 4	: Koordinasinya langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan informasi, melainkan kadang mereka tidak melihat informasi yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan informasi BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinnya juga bisa lewat hp.
Pewawancara	: Oh baik Pak. Kemudian berkaitan dengan prediksi apakah data-data dari BMKG membantu dalam pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor di Nganjuk?
Informan 4	: Pasti iya mbak. Karena untuk membuat pemetaan kawasan rawan bencana longsor juga membutuhkan peta curah hujan dan kegempaan dari BMKG. Yang paling sering digunakan itu data curah hujan. Sebab perlu diketahui bahwa longsor itu belum tentu disebabkan oleh gempa. Sangat kecil biasanya longsor yang diakibatkan oleh gempa. Lain halnya dengan curah hujan. Tingginya curah hujan pasti bisa menyebabkan tanah longsor. Sehingga prediksi untuk lokasi yang rawan bencana sangat penting.
Pewawancara	: Kemudian apakah pemetaan bencana khususnya bencana tanah longsor mempermudah masyarakat menginterpretasikan / mengetahui risiko dari bencana itu sendiri?
Informan 4	: Iya pasti mempermudah masyarakat menginterpretasikan risiko bencana karena penyebaran informasi dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.
Pewawancara	: Yang terakhir Pak mengenai kesiapsiagaan masyarakat. Apakah pemanfaatan peta kerawanan bencana tanah longsor dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
Informan 4	: Seharusnya bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena pemetaan daerah rawan longsor itu penting agar tidak ada korban saat terjadi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

	Kemarin itu di Ngetos ada 19 orang meninggal, itu diakibatkan oleh kesiapsiagaan masyarakat yang masih kurang.
Pewawancara	: Jadi pada dasarnya kesiapsiagaan masyarakat masih kurang ya Pak. Sehingga perlu adanya sistem peringatan dini berupa pemetaan kawasan risiko bencana longsor. Agar nantinya tidak ada lagi korban bencana longsor di Ngajuk.
Informan 4	: Iya semoga kedepan kesiapsiagaan masyarakat makin meningkat setelah adanya bencana longsor kemarin itu.
Pewawancara	: Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber saya.
Informan 4	: Sama-sama semoga lancar kuliahnya mbak.
Pewawancara	: Terim kasih Pak.

#### E. Transkrip Wawancara Informan 5 (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk)

Pewawancara : Titisari Haruming Tyas

Informan 5 : Bapak Didik Sujarwo

Pewawancara	: Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Titis mahasiswa S2 UNHAN RI. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian saya. Saya mengambil judul berkaitan dengan karakteristik geospasial wilayah risiko longsor di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini. Adapun hal-hal yang ingin saya tanya mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat akan bahaya longsor di Nganjuk.
Informan 5	: Iya apa yang ingin ditanyakan mbak.
Pewawancara	: Baik Pak, pertama yang ingin saya tanya mengenai tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Nganjuk. Bagaimana pemetaan kawasan rawan longsor di Kabupaten Nganjuk Pak?
Informan 5	: Kalau untuk daerah yang masuk wilayah rawan longsor itu ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Sawahan.
Pewawancara	: Berarti penanganan untuk mitigasi bencana longsor berfokus di tiga kecamatan ini Pak?
Informan 5	: Iya benar mbak mitigasinya berfokus di tiga kecamatan itu itu semua di lereng gunung Wilis bagian selatan.
Pewawancara	: Kemudian kegiatan yang selama ini sudah dilakukan untuk memberikan peringatan dini ke masyarakat seperti apa Pak? Apakah peringatan dini yang diberikan itu dapat meningkatkan respon masyarakat terhadap risiko bencana?
Informan 5	: Kalau dari DLH itu sudah lama tidak melaksanakan kegiatan mitigasi atau peringatan dini mbak. Terakhir itu tahun 2000 berapa ya saya lupa. Itu sudah lama sekali itu dan belum ada kegiatan seperti itu lagi. Dulu itu masih di Kantor Lingkungan Hidup bukan di Dinas Lingkungan Hidup.
Pewawancara	: Oh berarti saat ini belum ada kegiatan mitigasi atau peringatan dini ya Pak. Kemudian koordinasi antara DLH dengan instansi lain jika ada kejadian bencana longsor seperti apa Pak?
Informan 5	: Kalau bencana itu <i>leading sector</i> ada di BPBD. Nah BPBD itukan pelaksana. Mungkin nanti untuk tindak lanjut pencegahan DLH itu memberikan bantuan bibit tanaman/vegetasi dan penanaman

	kembali di hutan. Pernah juga kita itu melakukan pembangunan tangkis penahan longsor itu tahun 2008/2009 ya di Desa Nglarangan. Sudah lama mbak kita tidak melakukan kegiatan seperti itu.
Pewawancara	: Baik Pak, kemudian kalau untuk dokumen perencanaan, apakah DLH memiliki dokumen perencanaan untuk menangani kebencanaan Pak? Misalnya upaya-upaya mitigasi seperti itu?
Informan 5	: Tidak ada mbak. Kita tidak punya dokumen perencanaan mitigasi seperti itu.
Pewawancara	: Kalau untuk pengambilan kebijakan itu. Bagaimana penguatan peraturan daeran tetang rencana penanggulangan bencana? Misalnya untuk pelarangan pembangunan di daerah rawan longsor seperti itu?
Informan 5	: Belum ada pengambilan kebijakan berupa peraturan yang mengatur tentang pelarangan pembangunan di daerah rawan longsor. Belum ada setahu saya. Itu setahu saya yang membuat peraturan di PU karena berkaitan dengan IMB kan mbak.
Pewawancara	: Oh seperti itu, kemudian berkaitan dengan penyebaran informasi dan komuniiasi. Bagaimana cara DLH melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat? Apakah juga melakukan pemberian Pendidikan tanggap bencana sebagai upaya meningkatkan pengetahuan risiko bencana?
Informan 5	: Itu kegiatannya sudah dilakukan dulu sekali. Jadi pemberian Pendidikan tanggap bencana untuk meningkatkan pengetahuan risiko bencana dilakukan dengan penyuluhan dan pemberian bibit tanaman ke masyarakat. Itu kayaknya sebelum ada BPBD. Sekarang setelah ada BPBD sudah ditangani oleh BPBD. Kemudian kalau penyebaran dan komunikasi ini sudah dilakukan BPBD ya karena yang berkaitan langsung dengan kebencanaan itu BPBD. Termasuk untuk identifikasi wilayah mana yang risiko longsor itu di BPBD. Cuman kita kan ada alat berat yang bisa dipinjam untuk pencarian korban saat bencana terjadi.
Pewawancara	: Kalau untuk perencanaan tata ruang, apakah dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah DLH ikut andil dalam proses penyusunannya Pak?
Informan 5	: Iya ikut dilibatkan oleh BAPPEDA.
Pewawancara	: Kan kalau di tata ruang sendiri itu untuk prosentase besaran vegetasi atau RTH di Kabupaten Nganjuk seperti apa Pak?
Informan 5	: Kondisinya sekarang itu kalau RTH ya kita mengacu peraturan di atasnya tentang minimal jumla RTH. Tapi saat ini banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam vegetasi semusim. Kemudian banyak juga untuk pertanian seperti itu.
Pewawancara	: Oh kemudian apakah ada kasus mengenai penyalahan penggunaan lahan di daerah pegunungan yang rawan longsor Pak?
Informan 5	: Kalau tata ruang selama ini kok belum ada. Cuman kita ada PERBUP tentang insentif dan disinsentif tata ruang mbak.
Pewawancara	: Baik Pak, kalau untuk pemanfaatan peta kerawanan bencana tanah longsor apakah dapat membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana?
Informan 5	: Iya bisa mbak karena kalau pemetaan wilayah yang rawan longsor mana saja itu seharusnya bikin masyarakat lebih waspada dan harus siap dalam menghadapi bencana. Jadi ya pasti meningkatkan kesiapsiagaan bencana longsor.
Pewawancara	: Baik Bapak terima kasih atas informasi yang diberikan. Monggo Bapak

#### Lampiran 4. *Output* Pengolahan Data pada *Software NVivo 10*

Berikut ini adalah output dari hasil analisis tujuan penelitian kedua dengan bantuan *software NVivo 10*. Hasil koding setiap variabel digunakan untuk menentukan kesimpulan pemanfaatan karakteristik geospasial dan pemetaan tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini.

##### 1.Koding Variabel Karakteristik Geospasial

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 4 references coded [2,12% Coverage]

###### Reference 1 - 0,58% Coverage

---

Informan 1 : Iya, kalau bisa nanti yang tingkat kerawanan bencana tinggi jangan ada permukiman. Jadi lihat lokasi yang kemarin di Ngetos itu bukan tempat untuk hunian. Jadi tanah itu udah nyaris 10 derajat.

---

###### Reference 2 - 0,74% Coverage

---

Informan 1 : Iya, tata kelola air di kelerengan ekstrem itu tidak bagus. Sehingga airnya itu meresap dan membuat tanah jadi gembur kemudian tanah jatuh.

---

###### Reference 3 - 0,54% Coverage

---

Informan 1 : Iya, kemarin saya dikasih tau sama petugas fungsionalnya Badan Geologi. Beliau bilang jika itu ulah kita sendiri. Kemudian yang kedua tentang vegetasi, tanaman apa yang baik untuk ditanam di wilayah risiko longsor.

---

###### Reference 4 - 0,26% Coverage

---

Informan 1 : Bukan tanaman seperti apa saja yang harus ditanam. Tapi kita harus tau tanaman yang awal mula tertanam di wilayah itu sebagai bentuk kesiapsiagaan. Bukan berarti tanaman yang bagus menyerap air cocok ditanam di sana. Misalnya dulunya di wilayah itu tumbuh tanaman jati, y aitu yang harus di lestarikan di sana. Namun sekarang malah di sana itu banyak tanaman durian yang tidak cocok dengan histori tumbuhan yang ada di sana yang mana menyebabkan kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi menurun. Jadi begitu mitigasi untuk mengikat tanah yang paling sesuai memang jenis tumbuhan yang awal mula tumbuh di sana. Nah sampean bisa masukkan ini juga ke penelitian anda.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 6 references coded [1,89% Coverage]

###### Reference 1 - 0,31% Coverage

---

Informan 4 : Kalau untuk karakteristik geospasial seperti curah hujan itu dipengaruhi juga oleh topografi ya. Indonesia yang bergunung-gunung ini sangat berpengaruh terhadap curah hujan. Terus

---

---

untuk karakteristik geospasial curah hujan di Nganjuk itu rata-rata menengah sampai tinggi. Tapi ini pada tahun-tahun tertentu. Khusus untuk longsor kemarin itu memang curah hujan itu agak tinggi sampai 130 mm. Sehingga dengan karakteristik geospasial curah hujan tinggi dan topografi yang berbentuk gunung atau lereng-lereng sangat terjal itulah yang menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor. Itu kan hujan turun kemudian air terserap oleh tanah kemudian beban tanah semakin berat. karakteristik geospasial kemiringan tanah yang lebih dari 45 derajat ketika dia menerima beban berat dari air pada bidang gelincir itu akhirnya jatuh.

---

#### Reference 2 - 0,31% Coverage

Informan 4 : Kalau untuk karakteristik geospasial seperti curah hujan itu dipengaruhi juga oleh topografi ya. Indonesia yang bergunung-gunung ini sangat berpengaruh terhadap curah hujan. Terus untuk karakteristik geospasial curah hujan di Nganjuk itu rata-rata menengah sampai tinggi. Tapi ini pada tahun-tahun tertentu. Khusus untuk longsor kemarin itu memang curah hujan itu agak tinggi sampai 130 mm. Sehingga dengan karakteristik geospasial curah hujan tinggi dan topografi yang berbentuk gunung atau lereng-lereng sangat terjal itulah yang menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor. Itu kan hujan turun kemudian air terserap oleh tanah kemudian beban tanah semakin berat. karakteristik geospasial kemiringan tanah yang lebih dari 45 derajat ketika dia menerima beban berat dari air pada bidang gelincir itu akhirnya jatuh.

---

#### Reference 3 - 0,31% Coverage

Informan 4 : Kalau untuk karakteristik geospasial seperti curah hujan itu dipengaruhi juga oleh topografi ya. Indonesia yang bergunung-gunung ini sangat berpengaruh terhadap curah hujan. Terus untuk karakteristik geospasial curah hujan di Nganjuk itu rata-rata menengah sampai tinggi. Tapi ini pada tahun-tahun tertentu. Khusus untuk longsor kemarin itu memang curah hujan itu agak tinggi sampai 130 mm. Sehingga dengan karakteristik geospasial curah hujan tinggi dan topografi yang berbentuk gunung atau lereng-lereng sangat terjal itulah yang menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor. Itu kan hujan turun kemudian air terserap oleh tanah kemudian beban tanah semakin berat. karakteristik geospasial kemiringan tanah yang lebih dari 45 derajat ketika dia menerima beban berat dari air pada bidang gelincir itu akhirnya jatuh.

---

#### Reference 4 - 0,31% Coverage

Informan 4 : Kalau untuk karakteristik geospasial seperti curah hujan itu dipengaruhi juga oleh topografi ya. Indonesia yang bergunung-gunung ini sangat berpengaruh terhadap curah hujan. Terus untuk karakteristik geospasial curah hujan di Nganjuk itu rata-rata menengah sampai tinggi. Tapi ini pada tahun-tahun tertentu. Khusus untuk longsor kemarin itu memang curah hujan itu agak tinggi sampai 130 mm. Sehingga dengan karakteristik geospasial curah hujan tinggi dan topografi yang berbentuk gunung atau lereng-lereng sangat terjal itulah yang menyebabkan potensi terjadinya tanah longsor. Itu kan hujan

---

---

turun kemudian air terserap oleh tanah kemudian beban tanah semakin berat. **karakteristik geospasial** kemiringan tanah yang lebih dari 45 derajat ketika dia menerima beban berat dari air pada bidang gelincir itu akhirnya jatuh.

---

#### Reference 5 - 0,31% Coverage

Informan 4 : kedua **karakteristik geospasial** sama-sama berpengaruh yaitu curah hujan dan kemiringan lereng. Karena intensitas hujan tinggi dan terjadi sangat lama itu pertama yang berpotensi adalah longsor. Jadi air masuk dan tersimpan ditanah. Sedangkan tanah kit aitu jenisnya alluvial. Nah jenis tanah ini kalau terkena air jadi gembur atau seperti lumpur. Sedangkan tanah asli yang berada di lapisan bawahnya itu keras sehingga menyebabkan tanah di atasnya mudah jatuh. Itu terjadi kebanyakan dikemiringan yang lebih dari 45 derajat.

---

#### Reference 6 - 0,31% Coverage

Informan 4 : Kalau **karakteristik geospasial** gempa itu kan skalanya beda-beda ya. Gempa ini di Nganjuk ada beberapa sesar yang masih belum terpetakan tapi kemungkinan itu sesar. Contohnya yang di Nganjuk itu yang dari sesar kendeng yang sampai Mojokerto-Surabaya itu, sesar itu yang mempengaruhi potensi gempa di Nganjuk. Tetapi walaupun ada sesar, gempa di Nganjuk itu tidak besar tidak sampai 7 magnitudo. Namun karena sesar itu berada di darat walaupun kecil itu merusak.

## 2. Koding Variabel Pengambilan Kebijakan

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 14 references coded [5,79% Coverage]

#### Reference 1 - 0,49% Coverage

Informan 1 : PU kan yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan ya. Nah itu yang ga jalan.

---

#### Reference 2 - 0,25% Coverage

Informan 1 : Nah itu, kalau titik lokasi sudah OK dan tidak di wilayah risiko bencana, baru izin diberikan. Namun **hingga sekarang izin tersebut belum jalan**. Jangankan kok di kampung kayak di Ngetos. Di kota aja juga nggak jalan.

#### Reference 3 - 0,66% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itu kan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itukan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan

---

---

memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

#### Reference 4 - 0,65% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi **pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itukan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi.** Yang action itukan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

#### Reference 5 - 0,44% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itukan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itukan ya dinas teknis, contohnya orang PU. **Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan.** Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini

---

---

urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

#### Reference 6 - 0,92% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itu hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itu kan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah kasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

#### Reference 7 - 1,59% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itu hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itu kan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah kasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

#### Reference 8 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Oh tentang pengambilan kebijakan melalui peraturan daerah saat ini kita sendiri (pemerintah daerah) itu menggampangkan perkara bencana. Sampai hari ini Nganjuk itu belum ada

---

---

pengambilan kebijakan dalam bentuk PERDA Penanggulangan Bencana.

---

#### Reference 9 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Oh tentang pengambilan kebijakan melalui peraturan daerah saat ini kita sendiri (pemerintah daerah) itu menggampangkan perkara bencana. Sampai hari ini Nganjuk itu belum ada pengambilan kebijakan dalam bentuk PERDA Penanggulangan Bencana.

---

#### Reference 10 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Nah itu di Peraturan Daerah Perencanaan Tata Ruang sudah disebutkan wilayah rawan longsor itu kecamatan mana saja. Tapi ya tulisan tinggal tulisan. Waktu Pengambilan kebijakan tidak pernah memperhatikan pemetaan tingkat kerawanan bencana.

---

#### Reference 11 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum termanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

---

#### Reference 12 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Pengambilan kebijakan mengenai kebencanaan di Kabupaten Nganjuk, saat ini sudah diinisiatif dewan setelah ada kejadian longsor itu. Karena mendesak juga akhirnya RAPERDA disetujui. Saya sampaikan juga ke dewan kalau pengambilan kebijakan melalui PERDA itu untuk mengikat masyarakat dan pemerintah. Jadi itu harus disetujui agar masyarakat mau terlibat. Akhirnya kemarin itu bergerak dan mulai minta data awal. Kemudian pengarusutamaan itu kan apa yang nanti diutamakan contohnya pakai peta risiko bencana untuk memberikan izin dan lainnya.

#### Reference 13 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Pengambilan kebijakan mengenai kebencanaan di Kabupaten Nganjuk, saat ini sudah diinisiatif dewan setelah ada kejadian longsor itu. Karena mendesak juga akhirnya RAPERDA disetujui. Saya sampaikan juga ke dewan kalau pengambilan kebijakan melalui PERDA itu untuk mengikat masyarakat dan pemerintah. Jadi itu harus disetujui agar masyarakat mau terlibat. Akhirnya kemarin itu bergerak dan mulai minta data awal. Kemudian pengarusutamaan itu kan apa yang nanti diutamakan contohnya pakai peta risiko bencana untuk memberikan izin dan lainnya.

#### Reference 14 - 0,11% Coverage

Informan 1 : Iya mbak untuk pengurangan risiko bencana empat hal itu sangat penting yaitu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum dimanfaatkan, **pengambilan kebijakan** lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 2 references coded [0,79% Coverage]

#### Reference 1 - 0,39% Coverage

Informan 2 : BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk **pengambilan kebijakan** berupa pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan kawasan rawan bencana. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan tingkat kerawanan bencana tanah longsor sebagai alat prediksi munculnya risiko bencana.

#### Reference 2 - 0,39% Coverage

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk penyebaran informasi dan komunikasi mengenai tingkat kerawanan bencana bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya penyebaran informasi dan komunikasi ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan **pengambilan kebijakan** secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar by system.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 2 references coded [0,99% Coverage]

#### Reference 1 - 0,50% Coverage

Informan 3 : Kalau untuk **pengambilan kebijakan** yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena perencanaan tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran untuk pengambilan kebijakan apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.

#### Reference 2 - 0,50% Coverage

Informan 3 : Kalau untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena perencanaan tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran untuk **pengambilan kebijakan** apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 2 references coded [0,55% Coverage]

#### Reference 1 - 0,28% Coverage

Informan 4 : Koordinasi untuk **pengambilan kebijakan** segera dilakukan langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan informasi, melainkan kadang mereka tidak melihat informasi yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan informasi BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinanya juga bisa lewat hp.

**Reference 2 - 0,28% Coverage**

Informan 4 : Koordinasi untuk pengambilan kebijakan segera dilakukan langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan **pengambilan kebijakan** publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan informasi, melainkan kadang mereka tidak melihat informasi yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan informasi BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinanya juga bisa lewat hp.

**<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 4 references coded [2,52% Coverage]**

**Reference 1 - 0,71% Coverage**

Informan 5 : Belum ada **pengambilan kebijakan** berupa peraturan yang mengatur tentang pelarangan pembangunan di daerah rawan longsor. Belum ada setahu saya. Itu setahu saya yang melakukan pengambilan kebijakan dengan membuat peraturan di PU karena berkaitan dengan IMB kan mbak.

---

**Reference 2 - 0,71% Coverage**

Informan 5 : Belum ada pengambilan kebijakan berupa peraturan yang mengatur tentang pelarangan pembangunan di daerah rawan longsor. Belum ada setahu saya. Itu setahu saya yang melakukan **pengambilan kebijakan** dengan membuat peraturan di PU karena berkaitan dengan IMB kan mbak.

---

**Reference 3 - 0,37% Coverage**

Informan 5 : Kondisinya sekarang itu kalau RTH ya kita mengacu **pengambilan kebijakn** berupa peraturan di atasnya tentang minimal jumla RTH. Tapi saat ini banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam vegetasi semusim. Kemudian banyak juga untuk pertanian seperti itu.

**Reference 4 - 0,71% Coverage**

Informan 5 : Kalau **pengambilan kebijakan** mengenai penyalahan perencanaan tata ruang selama ini kok belum ada. Cuman kita ada peraturan Bupati yang berisi tentang insentif dan disinsentif perencanaan tata ruang.

---

### 3. Koding Variabel Perencanaan Tata Ruang

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 5 references coded [0,58% Coverage]

#### Reference 1 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Sudah ada perencanaan tata ruang, tetapi saat menyusun rencananya tidak memperhatikan pembangunan. Contohnya perencanaan tata ruang yang tidak memperhatikan rencana pembangunan ada di Desa Margopatut itu lokasinya di atas gunung, di situ mau dibangun bendungan tanpa memperhatikan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut. Padahal di tata ruangnya sudah bilang daerah itu risiko tinggi.

#### Reference 2 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Sudah ada perencanaan tata ruang, tetapi saat menyusun rencananya tidak memperhatikan pembangunan. Contohnya perencanaan tata ruang yang tidak memperhatikan rencana pembangunan ada di Desa Margopatut itu lokasinya di atas gunung, di situ mau dibangun bendungan tanpa memperhatikan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut. Padahal di tata ruangnya sudah bilang daerah itu risiko tinggi.

#### Reference 3 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Pembangunan bendungan dalam perencanaan tata ruang Itu permintaan dari Bupati Kabupaten Nganjuk dan dicantumkan oleh BAPPEDA.

---

#### Reference 4 - 0,12% Coverage

Informan 1 : La iya itu, padahal kajian teknis pembangunan bendungan itu tidak bisa rencanakan di Ds. Margopatut karena tanahnya itu lentur. Seperti kita naruh bak kalau airnya itu penuh bisa guling atau pecah. Jadi itu kurang ke bawah lokasinya. Nah padahal BAPPEDA kan sudah buat perencanaan tata ruang yang berbasis kajian risiko, namun tetap saja dicantumkan rencana pembangunan bendungan tersebut. Ada Namanya di KLHS di dalamnya ada bencananya.

#### Reference 5 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Nah itu di Peraturan Daerah Perencanaan Tata Ruang sudah disebutkan wilayah rawan longsor itu kecamatan mana saja. Tapi ya tulisan tinggal tulisan. Waktu Pengambilan kebijakan tidak pernah memperhatikan pemetaan tingkat kerawanan bencana.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 18 references coded [4,09% Coverage]

#### Reference 1 - 0,41% Coverage

Informan 2 : Bencana tanah longsor itu, kalau di Nganjuk itu ada bencana tanah longsor, banjir, dan bencana gunung api. Terus kalau dalam perencanaan tata ruang itu kita sudah merencanakan ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) baik peta maupun di batang tubuh pada indikasi programnya. Kemudian di perencanaan tata ruang itu juga direncanakan titik evakuasi dan jalur evakuasi bencana. Memang substansinya di perencanaan tata ruang harus seperti itu.

---

**Reference 2 - 0,41% Coverage**

Informan 2 : Bencana tanah longsor itu, kalau di Nganjuk itu ada bencana tanah longsor, banjir, dan bencana gunung api. Terus kalau dalam perencanaan tata ruang itu kita sudah merencanakan ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) baik peta maupun di batang tubuh pada indikasi programnya. Kemudian di **perencanaan tata ruang** itu juga direncanakan titik evakuasi dan jalur evakuasi bencana. Memang substansinya di perencanaan tata ruang harus seperti itu.

---

**Reference 3 - 0,41% Coverage**

Informan 2 : Bencana tanah longsor itu, kalau di Nganjuk itu ada bencana tanah longsor, banjir, dan bencana gunung api. Terus kalau dalam perencanaan tata ruang itu kita sudah merencanakan ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) baik peta maupun di batang tubuh pada indikasi programnya. Kemudian di perencanaan tata ruang itu juga direncanakan titik evakuasi dan jalur evakuasi bencana. Memang substansinya di **perencanaan tata ruang** harus seperti itu.

---

**Reference 4 - 0,41% Coverage**

Informan 2 : Nanti yang titik evakuasi dan jalur evakuasi dalam **perencanaan tata ruang** kami kasih petanya.

---

**Reference 5 - 0,08% Coverage**

Informan 2 : Dalam perencanaan **tata ruang** di wilayah pegunungan itu sebagian besar penggunaan lahannya sebagai hutan lindung dan hutan produksi.

---

**Reference 6 - 0,09% Coverage**

Informan 2 : Dalam perencanaan **tata ruang** di wilayah pegunungan itu sebagian besar penggunaan lahannya sebagai hutan lindung dan hutan produksi.

---

**Reference 7 - 0,41% Coverage**

Informan 2 : Ada pembangunan yang tidak sesuai dengan **perencanaan tata ruang** seperti kemarin itu kejadian di Selopuro sudah ada permukiman di kawasan rawan bencananya. Jadi ketikan terjadi longsoran ya memang sudah risikonya.

---

**Reference 8 - 0,21% Coverage**

Informan 2 : Jadi gini ya Ini kan kami ditataran **perencanaan** ya, nah nanti masih ada mitigasi di perencanaan, saat kejadian, dan rehab rekon. Nah dua hal terakhir untuk kesiapsiagaan ini di BPBD, sudah membuat Desa Tanggap Bencana.

---

**Reference 9 - 0,21% Coverage**

Informan 2 : Jadi gini ya Ini kan kami ditataran perencanaan ya, nah nanti masih ada mitigasi di **perencanaan**, saat kejadian, dan rehab rekon. Nah dua hal terakhir untuk kesiapsiagaan ini di BPBD, sudah membuat Desa Tanggap Bencana.

---

**Reference 10 - 0,41% Coverage**

Informan 2 : Saat ini **perencanaan tata ruang** sedang revisi, PERDanya No 2 Tahun 2011 ini sedang revisi sudah selesai evaluasi gubernur.

---

#### Reference 11 - 0,41% Coverage

Untuk Informan 2 : Kalau BAPPEDA memang dari segi perencanaan tata ruang nya. Jadi jika ada yang mengajukan izin kita overlay kan dengan peta tingkat kerawanan bencana. Kalau misal lokasinya masuk di lindung atau rawan bencana tinggi ya kita tolak pengajuan izinya.

---

#### Reference 12 - 0,09% Coverage

Informan 2 : BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk pengambilan kebijakan berupa pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan kawasan rawan bencana. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan tingkat kerawanan bencana tanah longsor sebagai alat prediksi munculnya risiko bencana.

---

#### Reference 13 - 0,08% Coverage

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

#### Reference 14 - 0,09% Coverage

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

#### Reference 15 - 0,09% Coverage

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

#### Reference 16 - 0,09% Coverage

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

#### Reference 17 - 0,08% Coverage

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk penyebaran informasi dan komunikasi mengenai tingkat kerawanan bencana bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya penyebaran informasi dan komunikasi ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan pengambilan kebijakan secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang

---

---

diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar by system.

---

**Reference 18 - 0,09% Coverage**

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk penyebaran informasi dan komunikasi mengenai tingkat kerawanan bencana bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya penyebaran informasi dan komunikasi ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan pengambilan kebijakan secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar by system.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 5 references coded [1,77% Coverage]

**Reference 1 - 0,52% Coverage**

Informan 3 : Iya PU juga selalu diundang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Kita tetap koordinasi biar nanti saat serah terima kita juga tau perkembangannya seperti apa.

---

**Reference 2 - 0,09% Coverage**

Informan 3 : Kalau untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena perencanaan tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran untuk pengambilan kebijakan apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.

**Reference 3 - 0,12% Coverage**

Informan 3 : Kalau untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena perencanaan tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran untuk pengambilan kebijakan apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.

**Reference 4 - 0,52% Coverage**

Informan 3 : Kalau untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah itu saat ini kita belum memiliki kuasa apapun karena perencanaan tata ruang masih dipegang oleh BAPPEDA. Hanya saja PU masuk dalam tim pemberian izin bangunan jadi semisal ada yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita ikut dalam tim itu untuk memberikan masukan/saran untuk pengambilan kebijakan apakah pengajuan itu layak diberikan izin atau tidak.

**Reference 5 - 0,52% Coverage**

Informan 3 : Iya pasti mbak. Dalam perencanaan tata ruang wilayah itu memuat Peta Tingkat kerawanan bencana juga. Ada bencana tanah longsor, banjir, dan gunung api kalau tidak salah ya.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 4 references coded [2,72% Coverage]

**Reference 1 - 0,37% Coverage**

Informan 5 : Tidak ada mbak. Kita tidak punya dokumen perencanaan mitigasi seperti itu.

**Reference 2 - 0,75% Coverage**

Informan 5 : Iya ikut dilibatkan oleh BAPPEDA untuk menyusun dokumen perencanaan tata ruang.

---

**Reference 3 - 0,75% Coverage**

Informan 5 : Kalau pengambilan kebijakan mengenai penyalahan perencanaan tata ruang selama ini kok belum ada. Cuman kita ada peraturan Bupati yang berisi tentang insentif dan disinsentif perencanaan tata ruang.

---

**Reference 4 - 0,85% Coverage**

Informan 5 : Kalau pengambilan kebijakan mengenai penyalahan perencanaan tata ruang selama ini kok belum ada. Cuman kita ada peraturan Bupati yang berisi tentang insentif dan disinsentif perencanaan tata ruang.

---

#### 4. Koding Variabel Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 5 references coded [0,61% Coverage]

**Reference 1 - 0,36% Coverage**

Informan 1 : Iya. Jadi meningkatkan respon masyarakat itu susah. Udah di pasang EWS dan sering bunyi, tapi ya gamau pergi masyarakat. Respon yang kurang itu kultur ya dari kakek, nenek, buyutnya sudah di sana. Itu tantangannya mitigasi bencana gerakan tanah. Nanti di revisi UU 24 itu ada lagi bencana namanya gerakan tanah. Beda dengan gempa bumi, kalau gempa bumi kan pemicunya bisa karena gunung berapi. Kalau Gerakan tanah itu tidak, pemicunya itu yang ulah manusia. Ngertikan Gerakan tanah itu penyebabnya apa?

**Reference 2 - 0,11% Coverage**

Informan 1 : Jadi di wilayah yang kemarin longsor itu sudah ada **Early Warning System** sebagai prediksi bencana berupa alat dan sistem. Jadi **Early Warning System** itu kan alat dan sistem ya. Kalau alatnya bunyi apa yang Anda lakukan. Pada saat itu kejadian longsor terjadi waktu magrib, pas waktu orang-orang terlena atau pada ke masjid. Nah ditambah frekuensi simulasinya ini yang masih kurang sehingga tidak respon masyarakat terhadap bencana masih minim.

**Reference 3 - 0,11% Coverage**

Informan 1 : Jadi di wilayah yang kemarin longsor itu sudah ada **Early Warning System** sebagai prediksi bencana berupa alat dan sistem. Jadi **Early Warning System** itu kan alat dan sistem ya. Kalau alatnya bunyi apa yang Anda lakukan. Pada saat itu kejadian longsor terjadi waktu magrib, pas waktu orang-orang terlena atau pada ke masjid. Nah

ditambah frekuensi simulasinya ini yang masih kurang sehingga tidak respon masyarakat terhadap bencana masih minim.

#### Reference 4 - 0,02% Coverage

Informan 1 : Kalau untuk kesiapsiagaan di sana itu sudah Desa Tangguh Bencana. Jadi sudah ada Forum Pengurangan Risiko dan Tim Relawan. Jadi BPBD disalahkan ya tidak bisa karena itu sudah kita lakukan semua. Dan bencana itu kan segitiga yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau masyarakatnya tidak pengetahuan risiko bencana sama juga bohong. Mungkin untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke masyarakat seperti suara EWS dapat diganti seperti suara kaleng cat agar masyarakat lebih waspada, kalau suaranya seperti sirine nanti dikiranya suara ambulance. Suara sirine itu ternyata juga berpengaruh ternyata.

#### Reference 5 - 0,02% Coverage

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih mendengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma diinterpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 1 reference coded [0,30% Coverage]

#### Reference 1 - 0,30% Coverage

Informan 4 : Iya pasti mempermudah masyarakat melakukan interpretasi risiko bencana karena penyebaran informasi dan komunikasi dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini atau respon masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.

## 5. Koding Variabel Tingkat Kerawanan Bencana

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 13 references coded [3,96% Coverage]

#### Reference 1 - 0,12% Coverage

Informan 1 : Nah itu, kalau titik lokasi sudah OK dan tidak di **wilayah risiko bencana**, baru izin diberikan. Namun hingga sekarang izin tersebut belum jalan. Jangankan kok di kampung kayak di Ngetos. Di kota aja juga nggak jalan.

---

#### Reference 2 - 0,64% Coverage

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itu kan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itu kan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan. Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. **Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.**

---

#### Reference 3 - 0,58% Coverage

Informan 1 : Iya, jadi kalau mau mendirikan bangunan harus tau tanahnya itu memiliki tingkat kerawanan bencana atau tidak . Ini juga untuk keselamatan masyarakat. Jadi ini masih menjadi PR Bersama. Bahkan aku pengen ngundang Badan Geologi untuk ke sini lagi, tak suruh untuk memetakan tingkat kerawanan bencana di daerah Ngetos sana. Agar ada zonasi mana yang punya tingkat kerawanan bencana tinggi

#### Reference 4 - 0,66% Coverage

Informan 1 : Iya, jadi kalau mau mendirikan bangunan harus tau tanahnya itu memiliki tingkat kerawanan bencana atau tidak . Ini juga untuk keselamatan masyarakat. Jadi ini masih menjadi PR Bersama. Bahkan aku pengen ngundang Badan Geologi untuk ke sini lagi, tak suruh untuk memetakan tingkat kerawanan bencana di daerah Ngetos sana. Agar ada zonasi mana yang punya tingkat kerawanan bencana tinggi

#### Reference 5 - 0,43% Coverage

Informan 1 : Iya, kalau bisa nanti yang tingkat kerawanan bencana tinggi jangan ada permukiman. Jadi lihat lokasi yang kemarin di Ngetos itu bukan tempat untuk hunian. Jadi tanah itu udah nyaris 10 derajat.

---

#### Reference 6 - 0,14% Coverage

Informan 1 : Kata badan Geologi itu di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana longsor tinggi kalau bisa jangan ada aliran air terbuka, bolehnya saluran air tertutup/pipa. Nah di sana ada sungai. Katanya

sehebat apapun anda membangun sungai di tempat yang miring-miring itu pasti nanti retak. Kalau retakkan airnya jatuh.

**Reference 7 - 0,54% Coverage**

Informan 1 : Iya, kemarin saya dikasih tau sama petugas fungsionalnya Badan Geologi. Beliau bilang jika itu ulah kita sendiri. Kemudian yang kedua tentang vegetasi, tanaman apa yang baik untuk ditanam di wilayah risiko longsor.

**Reference 8 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Iya pemetaan tingkat kerawanan bencana sudah ada dari Kementerian ESDM tapi ini sudah lama. Tapi adanya pemetaan tingkat kerawanan bencana gerakan tanah ya bukan longsor. Kalau untuk longsor kita pakai kajian risiko dan posisi hari ini dokumennya sedang update atau diperbaharui karena ada kejadian baru.

**Reference 9 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Iya pemetaan tingkat kerawanan bencana sudah ada dari Kementerian ESDM tapi ini sudah lama. Tapi adanya pemetaan tingkat kerawanan bencana gerakan tanah ya bukan longsor. Kalau untuk longsor kita pakai kajian risiko dan posisi hari ini dokumennya sedang update atau diperbaharui karena ada kejadian baru.

**Reference 10 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Nah itu di Peraturan Daerah Perencanaan Tata Ruang sudah disebutkan wilayah rawan longsor itu kecamatan mana saja. Tapi ya tulisan tinggal tulisan. Waktu Pengambilan kebijakan tidak pernah memperhatikan pemetaan tingkat kerawanan bencana.

**Reference 11 - 0,13% Coverage**

Informan 1 : Sudah dilakukan penyebaran informasi dan komunikasi. melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Itu sama KEMENDAGRI ditaruh di nomor 1 karena itu barang penting. Nah tentang apakah pemetaan itu mempermudah atau tidak? Ya sebenarnya harusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor itu mempermudah masyarakat, jadi saat pembentukan itu kita kasih tau daerah anda ini rawan longsor menurut pemetaan kawasan rawan bencana longsor.

**Reference 12 - 0,11% Coverage**

Informan 1 : Sudah dilakukan penyebaran informasi dan komunikasi. melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Itu sama KEMENDAGRI ditaruh di nomor 1 karena itu barang penting. Nah tentang apakah pemetaan itu mempermudah atau tidak? Ya sebenarnya harusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor itu mempermudah masyarakat, jadi saat pembentukan itu kita kasih tau daerah anda ini rawan longsor menurut pemetaan kawasan rawan bencana longsor.

**Reference 13 - 0,21% Coverage**

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan

---

seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum dimanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 12 references coded [4,28% Coverage]

**Reference 1 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Iya jadi pemetaan **tingkat kerawanan bencana** longsor sedang rendah. Kalau tingkat kerawanan bencana longsor itu dipengaruhi dari curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah itu ya. Kita klasifikasikan tingkat kerawanan bencana longsor itu menjadi tinggi, sedang, rendah.

**Reference 2 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Iya jadi pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor sedang rendah. Kalau **tingkat kerawanan bencana** longsor itu dipengaruhi dari curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah itu ya. Kita klasifikasikan tingkat kerawanan bencana longsor itu menjadi tinggi, sedang, rendah.

**Reference 3 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Iya jadi pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor sedang rendah. Kalau tingkat kerawanan bencana longsor itu dipengaruhi dari curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah itu ya. Kita klasifikasikan **tingkat kerawanan bencana** longsor itu menjadi tinggi, sedang, rendah.

**Reference 4 - 0,47% Coverage**

Untuk Informan 2 : Kalau BAPPEDA memang dari segi perencanaan tata ruang nya. Jadi jika ada yang mengajukan izin kita overlay kan dengan peta **tingkat kerawanan bencana**. Kalau misal lokasinya masuk di lindung atau rawan bencana tinggi ya kita tolak pengajuan izinya.

---

**Reference 5 - 0,13% Coverage**

Untuk Informan 2 : Kalau BAPPEDA memang dari segi perencanaan tata ruang nya. Jadi jika ada yang mengajukan izin kita overlay kan dengan peta tingkat kerawanan bencana. Kalau misal lokasinya masuk di lindung atau rawan **bencana** tinggi ya kita tolak pengajuan izinya.

---

**Reference 6 - 0,13% Coverage**

Informan 2 : BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk pengambilan kebijakan berupa pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan kawasan rawan **bencana**. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan tingkat kerawanan bencana tanah longsor sebagai alat prediksi munculnya risiko bencana.

---

**Reference 7 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk pengambilan kebijakan berupa pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan kawasan rawan bencana. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan **tingkat kerawanan bencana** tanah longsor sebagai alat prediksi munculnya risiko bencana.

**Reference 8 - 0,13% Coverage**

Informan 2 : Kalau pemberian pengetahuan tentang risiko **bencana** itu peran dari BPBD termasuk nanti mereka itu membuat Desa Tanggap Bencana. Memberikan pengetahuan tentang risiko berupa edukasi kepada masyarakat melalui relawan itu mengenai tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut.

**Reference 9 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Kalau pemberian pengetahuan tentang risiko bencana itu peran dari BPBD termasuk nanti mereka itu membuat Desa Tanggap Bencana. Memberikan pengetahuan tentang risiko berupa edukasi kepada masyarakat melalui relawan itu mengenai **tingkat kerawanan bencana** di wilayah tersebut.

**Reference 10 - 0,13% Coverage**

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan **Bencana**. Jadi nanti bisa di *overlay*

**Reference 11 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk penyebaran informasi dan komunikasi mengenai **tingkat kerawanan bencana** bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya penyebaran informasi dan komunikasi ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan pengambilan kebijakan secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar *by system*.

**Reference 12 - 0,47% Coverage**

Informan 2 : Seharusnya bisa, karena fungsi dari pemetaan **tingkat kerawanan bencana** itu agar kesiapsiagaan masyarakat lebih meningkat. Namun memang pemahaman dan pengetahuan tentang risiko yang dimiliki masyarakat masih kurang. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang praktek langsung di lapangan. Selama ini kendala itu memang di sosial masyarakatnya. Karena menyadarkan masyarakat itu susah juga.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 9 references coded [3,62% Coverage]

**Reference 1 - 0,17% Coverage**

---

Informan 3 : Jadi mbak, kita sudah buat Peta Kawasan Risiko **Bencana** untuk tau tingkat kerawanan bencana di Nganjuk. Tapi saat ini file tentang tingkat kerawanan bencana itu masih dipegang oleh BAPPEDA. Karena belum diserahkan ke PU. Saat ini masih proses pengesahan RTRW jadi masih dipegang BAPPEDA.

---

#### Reference 2 - 0,59% Coverage

---

Informan 3 : Jadi mbak, kita sudah buat Peta Kawasan Risiko Bencana untuk tau **tingkat kerawanan bencana** di Nganjuk. Tapi saat ini file tentang tingkat kerawanan bencana itu masih dipegang oleh BAPPEDA. Karena belum diserahkan ke PU. Saat ini masih proses pengesahan RTRW jadi masih dipegang BAPPEDA.

---

#### Reference 3 - 0,59% Coverage

---

Informan 3 : Jadi mbak, kita sudah buat Peta Kawasan Risiko Bencana untuk tau tingkat kerawanan bencana di Nganjuk. Tapi saat ini file tentang **tingkat kerawanan bencana** itu masih dipegang oleh BAPPEDA. Karena belum diserahkan ke PU. Saat ini masih proses pengesahan RTRW jadi masih dipegang BAPPEDA.

---

#### Reference 4 - 0,59% Coverage

---

Informan 3 : Iya seharusnya peta **tingkat kerawanan bencana** itu termasuk instrument penting dalam pengendalian pembangunan. Tapi ya saat ini banyak orang-orang yang membangun tanpa izin. Tidak mengurus izin membangun. Padahal mereka harus tahu apakah lahan mereka itu rawan bencana atau tidak.

#### Reference 5 - 0,17% Coverage

---

Informan 3 : Iya seharusnya peta tingkat kerawanan bencana itu termasuk instrument penting dalam pengendalian pembangunan. Tapi ya saat ini banyak orang-orang yang membangun tanpa izin. Tidak mengurus izin membangun. Padahal mereka harus tahu apakah lahan mereka itu rawan **bencana** atau tidak.

#### Reference 6 - 0,17% Coverage

---

Informan 3 : Iya benar, kalau prediksi dengan pemetaan **tingkat** kerawanan bencana itu diremehkan dan dianggap tidak penting ya bencana seperti kemarin di Ngetos Selopuro itu pasti bisa terjadi lagi.

---

#### Reference 7 - 0,17% Coverage

---

Informan 3 : Iya benar, kalau prediksi dengan pemetaan tingkat kerawanan **bencana** itu diremehkan dan dianggap tidak penting ya bencana seperti kemarin di Ngetos Selopuro itu pasti bisa terjadi lagi.

---

#### Reference 8 - 0,59% Coverage

---

Informan 3 : Kalau hal teknis untuk kesiapsiagaan yang lebih tahu sebenarnya BPBD ya karena BPBD yang punya DESTANA dan tim relawan gitu. Tapi kalau untuk interpretasi atau pemahaman dari masyarakat mengenai pemetaan bencana sebagai bentuk sistem peringatan dini itu belum. Karena nyatanya masih ada aja korban dari bencana kemarin contohnya di Ngetos itu ada 19 orang meninggal akibat tanah longsor. Jadi interpretasi masyarakat itu ya kurang tentang **tingkat kerawanan bencana**.

---

**Reference 9 - 0,59% Coverage**

---

Informan 3 : Iya seharusnya peta **tingkat kerawanan bencana** itu bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat ya dalam menghadapi bencana ini juga menjadi sangat penting khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gunung wilis sana. Itu di sana kan rawan longsor jadi pemahaman tentang lokasi mana saja yang rawan longsor dan apa yang harus dilakukan itu perlu. Itu jadi tugas pemerintah juga agar masyarakat bisa paham dan kesiapsiagaan masyarakat itu meningkat. Pada intinya kerja sama dari berbagai pihak ya tidak bisa hanya satu pihak yang berusaha. Nanti tidak bisa maksimal.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 4 references coded [1,07% Coverage]

---

**Reference 1 - 0,33% Coverage**

---

Informan 4 : Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya peta **tingkat kerawanan bencana** itu ESDM. Kita hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu penyebaran informasi dan komunikasi misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.

---

---

**Reference 2 - 0,33% Coverage**

---

Informan 4 : Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu ESDM. Kita hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya peta **tingkat kerawanan bencana** itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu penyebaran informasi dan komunikasi misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.

---

---

**Reference 3 - 0,33% Coverage**

---

Informan 4 : Pasti iya mbak. Karena untuk membuat pemetaan **tingkat kerawanan bencana** longsor juga membutuhkan peta curah hujan dan kegempaan dari BMKG. Yang paling sering digunakan itu data curah hujan. Sebab perlu diketahui bahwa longsor itu belum tentu disebabkan oleh gempa. Sangat kecil biasanya longsor yang diakibatkan oleh gempa. Lain halnya dengan curah hujan. Tingginya curah hujan pasti bisa menyebabkan tanah longsor. Sehingga prediksi untuk lokasi yang rawan bencana sangat penting.

---

---

**Reference 4 - 0,09% Coverage**

---

Informan 4 : Pasti iya mbak. Karena untuk membuat pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor juga membutuhkan peta curah hujan dan kegempaan dari BMKG. Yang paling sering digunakan itu data curah hujan. Sebab perlu diketahui bahwa longsor itu belum tentu disebabkan oleh gempa. Sangat kecil biasanya longsor yang diakibatkan oleh gempa. Lain halnya

---

---

dengan curah hujan. Tingginya curah hujan pasti bisa menyebabkan tanah longsor. Sehingga prediksi untuk lokasi yang rawan **bencana** sangat penting.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 2 references coded [1,70% Coverage]

**Reference 1 - 0,85% Coverage**

Informan 5 : Berkaitan dengan **tingkat kerawanan bencana** terdapat daerah yang masuk wilayah rawan longsor itu ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Sawahan.

---

**Reference 2 - 0,85% Coverage**

Informan 5 : Iya seharusnya pemetaan **tingkat kerawanan bencana** longsor dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Wilayah mana saja itu seharusnya bikin masyarakat lebih waspada dan harus siap repon dalam menghadapi bencana. Jadi ya pasti meningkatkan kesiapsiagaan bencana longsor.

---

## 6. Koding Variabel Interpretasi

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 1 reference coded [0,06% Coverage]

**Reference 1 - 0,06% Coverage**

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma di **interpretasi** kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 2 references coded [0,57% Coverage]

**Reference 1 - 0,28% Coverage**

Informan 3 : Kalau hal teknis untuk kesiapsiagaan yang lebih tahu sebenarnya BPBD ya karena BPBD yang punya DESTANA dan tim relawan gitu. Tapi kalau untuk **interpretasi** atau pemahaman dari masyarakat mengenai

pemetaan bencana sebagai bentuk sistem peringatan dini itu belum. Karena nyatanya masih ada aja korban dari bencana kemarin contohnya di Ngetos itu ada 19 orang meninggal akibat tanah longsor. Jadi interpretasi masyarakat itu ya kurang tentang tingkat kerawanan bencana.

#### Reference 2 - 0,28% Coverage

Informan 3 : Kalau hal teknis untuk kesiapsiagaan yang lebih tahu sebenarnya BPBD ya karena BPBD yang punya DESTANA dan tim relawan gitu. Tapi kalau untuk interpretasi atau pemahaman dari masyarakat mengenai pemetaan bencana sebagai bentuk sistem peringatan dini itu belum. Karena nyatanya masih ada aja korban dari bencana kemarin contohnya di Ngetos itu ada 19 orang meninggal akibat tanah longsor. Jadi **interpretasi** masyarakat itu ya kurang tentang tingkat kerawanan bencana.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 1 reference coded [0,16% Coverage]

#### Reference 1 - 0,16% Coverage

Informan 4 : Iya pasti mempermudah masyarakat melakukan **interpretasi** risiko bencana karena penyebaran informasi dan komunikasi dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini atau respon masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.

## 7. Koding Variabel Respon

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 7 references coded [0,48% Coverage]

#### Reference 1 - 0,27% Coverage

Informan 1 : Iya. Jadi meningkatkan respon masyarakat itu susah. Udah di pasang EWS dan sering bunyi, tapi ya gamau pergi masyarakat. Respon yang kurang itu kultur ya dari kakek, nenek, buyutnya sudah di sana. Itu tantangannya mitigasi bencana gerakan tanah. Nanti di revisi UU 24 itu ada lagi bencana namanya gerakan tanah. Beda dengan gempa bumi, kalau gempa bumi kan pemicunya bisa karena gunung berapi. Kalau Gerakan tanah itu tidak, pemicunya itu yang ulah manusia. Ngertikan Gerakan tanah itu penyebabnya apa?

#### Reference 2 - 0,03% Coverage

Informan 1 : Iya, dulu saja saya dipanggil ke dewan kenapa bisa kejadian longsor kemarin di Ngetos. Ya ini nggak enakya di BPBD baru ditanyai dan kejadian jadi berubah sangat penting. Padahal itu bisa dicegah dengan **respon** yang baik dari masyarakat, sangat bisa dicegah. Kemarin itu lumayan ada 19 orang yang meninggal. La di Luwu kemarin Cuma berapa itu 4/5 saja. Nah baru panik, siapa yang salah. Nggak enakya itu, padahal kita sudah teriak-teriak dari awal. Kita butuh anggaran untuk ini itu tidak dikasih. Ya kalau mengandalkan partisipasi masyarakat desa itu mimpi. Jadi harus pemerintah karena itu urusan wajib.

#### Reference 3 - 0,04% Coverage

Informan 1 : Jadi di wilayah yang kemarin longsor itu sudah ada Early Warning System sebagai prediksi bencana berupa alat dan sistem. Jadi Early Warning System itu kan alat dan sistem ya. Kalau alatnya bunyi apa yang Anda lakukan. Pada saat itu kejadian longsor terjadi waktu magrib, pas waktu orang-orang terlena atau pada ke masjid. Nah ditambah frekuensi simulasinya ini yang masih kurang sehingga tidak **respon** masyarakat terhadap bencana masih minim.

#### Reference 4 - 0,04% Coverage

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak **direspons** oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma diinterpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

#### Reference 5 - 0,03% Coverage

Informan 1 : Nah pemerintah juga mikirnya seperti itu dan masyarakat juga tidak memberikan **respon** yang baik. Kita juga pernah mengajak masyarakat di wilayah risiko longsor itu untuk studi banding ke Bantul. Sudah dapat ilmu di sana tapi ya gitu, saat di desa tidak diterapkan. Simulasi itu harus dilakukan periodik/ berkala jangan setahun sekali. Kalau rutin kan ada yang terjadwal dan tidak terjadwal.

#### Reference 6 - 0,03% Coverage

Informan 1 : Sudah ada pemanfaatan media elektronik untuk penyebaran informasi dan komunikasi. Contohnya adalah *WhatsApps Group* untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke desa rawan bencana. Terus informasi itu kita dapatkan dari BMKG baik dari Juanda maupun Sawahan. Kalau lagi musim hujan kayak kemarin itu informasinya diperbaharui satu jam sekali. Kita juga berkomunikasi sama orang pengairan. Kalau DAM ini sudah ketinggian sekian yang bawah ini siap banjir harus evakuasi. Kemarin itu sebenarnya juga sudah jelas sosialisasinya kalau saat banjir segera evakuasi nanti jika sudah berhenti 1-2 jam baru boleh kembali. Terus kemarin itu saya juga sudah coba interview beberapa orang sebenarnya terasa tidak kalau mau ada kejadian. Mereka bilang sebenarnya juga terasa karena hujannya lama. Tapi **respon** masyarakat yang masih kurang.

#### Reference 7 - 0,04% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum termanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 2 references coded [0,28% Coverage]

#### Reference 1 - 0,14% Coverage

Informan 3 : Kalau untuk sosialisasi sebagai upaya membentuk respon masyarakat sudah sering dilakukan setiap tahun ya dilakukan oleh BPBD. Karena yang memiliki peran itu di BPBD. Nanti coba wawancara lebih mendalam ke BPBD mengenai membentuk respon masyarakat ini ya.

#### Reference 2 - 0,14% Coverage

Informan 3 : Kalau untuk sosialisasi sebagai upaya membentuk respon masyarakat sudah sering dilakukan setiap tahun ya dilakukan oleh BPBD. Karena yang memiliki peran itu di BPBD. Nanti coba wawancara lebih mendalam ke BPBD mengenai membentuk respon masyarakat ini ya.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 1 reference coded [0,08% Coverage]

#### Reference 1 - 0,08% Coverage

Informan 4 : Iya pasti mempermudah masyarakat melakukan interpretasi risiko bencana karena penyebaran informasi dan komunikasi dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini atau respon masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.

## 8. Koding Variabel Kesiapsiagaan

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 7 references coded [0,49% Coverage]

#### Reference 1 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Bukan tanaman seperti apa saja yang harus ditanam. Tapi kita harus tau tanaman yang awal mula tertanam di wilayah itu sebagai bentuk kesiapsiagaan. Bukan berarti tanaman yang bagus menyerap air cocok ditanam di sana. Misalnya dulunya di wilayah itu tumbuh tanaman jati, y aitu yang harus di lestarikan di sana. Namun sekarang malah di sana itu banyak tanaman durian yang tidak cocok dengan histori tumbuhan yang ada di sana yang mana menyebabkan kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi menurun. Jadi begitu mitigasi untuk mengikat tanah

---

yang paling sesuai memang jenis tumbuhan yang awal mula tumbuh di sana. Nah sampean bisa masukkan ini juga ke penelitian anda.

---

#### Reference 2 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Bukan tanaman seperti apa saja yang harus ditanam. Tapi kita harus tau tanaman yang awal mula tertanam di wilayah itu sebagai bentuk kesiapsiagaan. Bukan berarti tanaman yang bagus menyerap air cocok ditanam di sana. Misalnya dulunya di wilayah itu tumbuh tanaman jati, y aitu yang harus di lestarikan di sana. Namun sekarang malah di sana itu banyak tanaman durian yang tidak cocok dengan histori tumbuhan yang ada di sana yang mana menyebabkan **kesiapsiagaan** terhadap bencana menjadi menurun. Jadi begitu mitigasi untuk mengikat tanah yang paling sesuai memang jenis tumbuhan yang awal mula tumbuh di sana. Nah sampean bisa masukkan ini juga ke penelitian anda.

---

#### Reference 3 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Tidak ada tapi kurang maksimal. Kita ini seperti anak tiri. Lebih besar anggaran di PU, tidak apa sebenarnya lebih besar di PU asal tolong diperhatikan bekas kejadian bencana itu diperhatikan. Seharusnya itu menjadi prioritas di atas prioritas pembangunan daerah. Contohnya tanggul jebol ya harus segera dibenahi, nanti kalau tidak segera dibenahi kemudian sungai penuh lagi nanti dampaknya ke petani. Kembali lagi kesejahteraan. Tapi mereka tidak berpikir sejauh itu akhirnya kalau kejadian teriak-teriak menyalahkan BPBD. Padahal kita sudah memberitahu sejak awal. Jadi terkesan **kesiapsiagaan** kita dalam menangani bencana masih sangat kurang. Urusan wajib melindungi masyarakat tapi actionnya tidak sejauh itu.

---

#### Reference 4 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Kalau untuk **kesiapsiagaan** di sana itu sudah Desa Tangguh Bencana. Jadi sudah ada Forum Pengurangan Risiko dan Tim Relawan. Jadi BPBD disalahkan ya tidak bisa karena itu sudah kita lakukan semua. Dan bencana itu kan segitiga yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau masyarakatnya tidak pengetahuan risiko bencana sama juga bohong. Mungkin untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke masyarakat seperti suara EWS dapat diganti seperti suara kaleng cat agar masyarakat lebih waspada, kalau suaranya seperti sirine nanti dikiranya suara ambulance. Suara sirine itu ternyata juga berpengaruh ternyata.

---

#### Reference 5 - 0,07% Coverage

Informan 1 : **Kesiapsiagaan** desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau

*genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma diinterpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

#### Reference 6 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan **kesiapsiagaan** masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma diinterpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

#### Reference 7 - 0,07% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan **kesiapsiagaan** masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum dimanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 3 references coded [0,73% Coverage]

#### Reference 1 - 0,24% Coverage

Informan 2 : Jadi gini ya Ini kan kami ditataran perencanaan ya, nah nanti masih ada mitigasi di perencanaan, saat kejadian, dan rehab rekon. Nah dua hal terakhir untuk **kesiapsiagaan** ini di BPBD, sudah membuat Desa Tangguh Bencana.

---

**Reference 2 - 0,24% Coverage**

Informan 2 : Seharusnya bisa, karena fungsi dari pemetaan tingkat kerawanan bencana itu agar **kesiapsiagaan** masyarakat lebih meningkat. Namun memang pemahaman dan pengetahuan tentang risiko yang dimiliki masyarakat masih kurang. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang praktek langsung di lapangan. Selama ini kendala itu memang di sosial masyarakatnya. Karena menyadarkan masyarakat itu susah juga.

---

**Reference 3 - 0,24% Coverage**

Informan 2 : Seharusnya bisa, karena fungsi dari pemetaan tingkat kerawanan bencana itu agar kesiapsiagaan masyarakat lebih meningkat. Namun memang pemahaman dan pengetahuan tentang risiko yang dimiliki masyarakat masih kurang. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan **kesiapsiagaan** yang praktek langsung di lapangan. Selama ini kendala itu memang di sosial masyarakatnya. Karena menyadarkan masyarakat itu susah juga.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 3 references coded [0,92% Coverage]

**Reference 1 - 0,31% Coverage**

Informan 3 : Kalau hal teknis untuk **kesiapsiagaan** yang lebih tahu sebenarnya BPBD ya karena BPBD yang punya DESTANA dan tim relawan gitu. Tapi kalau untuk interpretasi atau pemahaman dari masyarakat mengenai pemetaan bencana sebagai bentuk sistem peringatan dini itu belum. Karena nyatanya masih ada aja korban dari bencana kemarin contohnya di Ngetos itu ada 19 orang meninggal akibat tanah longsor. Jadi interpretasi masyarakat itu ya kurang tentang tingkat kerawanan bencana.

**Reference 2 - 0,31% Coverage**

Informan 3 : Iya seharusnya peta tingkat kerawanan bencana itu bisa membangun **kesiapsiagaan** masyarakat ya dalam menghadapi bencana ini juga menjadi sangat penting khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gunung wilis sana. Itu di sana kan rawan longsor jadi pemahaman tentang lokasi mana saja yang rawan longsor dan apa yang harus dilakukan itu perlu. Itu jadi tugas pemerintah juga agar masyarakat bisa paham dan kesiapsiagaan masyarakat itu meningkat. Pada intinya kerja sama dari berbagai pihak ya tidak bisa hanya satu pihak yang berusaha. Nanti tidak bisa maksimal.

---

**Reference 3 - 0,31% Coverage**

Informan 3 : Iya seharusnya peta tingkat kerawanan bencana itu bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat ya dalam menghadapi bencana ini juga menjadi sangat penting khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gunung wilis sana. Itu di sana kan rawan longsor jadi pemahaman tentang lokasi mana saja yang rawan longsor dan apa yang harus dilakukan itu perlu. Itu jadi tugas pemerintah juga agar masyarakat bisa paham dan **kesiapsiagaan** masyarakat itu meningkat. Pada intinya kerja sama dari berbagai pihak ya tidak bisa hanya satu pihak yang berusaha. Nanti tidak bisa maksimal.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 5 references coded [0,85% Coverage]

**Reference 1 - 0,17% Coverage**

Informan 4 : Jadi gini peringatan dini berupa penyebaran informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirnya rugi. Kalau penyebaran informasi dan komunikasi bidang klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk peningkatan pengetahuan tentang risiko. Sekolah lapang itu ada untuk para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan tentang risiko bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan.

---

#### Reference 2 - 0,17% Coverage

Informan 4 : Seharusnya bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena pemetaan daerah rawan longsor itu penting agar tidak ada korban saat terjadi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemarin itu di Ngetos ada 19 orang meninggal, itu diakibatkan oleh kesiapsiagaan masyarakat yang masih kurang.

---

#### Reference 3 - 0,17% Coverage

Informan 4 : Seharusnya bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena pemetaan daerah rawan longsor itu penting agar tidak ada korban saat terjadi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemarin itu di Ngetos ada 19 orang meninggal, itu diakibatkan oleh kesiapsiagaan masyarakat yang masih kurang.

---

#### Reference 4 - 0,17% Coverage

Informan 4 : Seharusnya bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena pemetaan daerah rawan longsor itu penting agar tidak ada korban saat terjadi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemarin itu di Ngetos ada 19 orang meninggal, itu diakibatkan oleh kesiapsiagaan masyarakat yang masih kurang.

---

#### Reference 5 - 0,17% Coverage

Informan 4 : Iya semoga kedepan kesiapsiagaan masyarakat makin meningkat setelah adanya bencana longsor kemarin itu.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 5 references coded [2,21% Coverage]

---

#### Reference 1 - 0,44% Coverage

Informan 5 : Iya benar mbak kesiapsiagaan dan mitigasinya berfokus di tiga kecamatan itu Itu semua di lereng gunung Wilis bagian selatan.

---

#### Reference 2 - 0,44% Coverage

Informan 5 : Kalau dari DLH itu sudah lama tidak melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan atau mitigasi mbak. Terakhir melakukan kegiatan untuk kesiapsiagaan itu tahun 2000 berapa ya saya lupa. Itu sudah lama sekali itu dan belum ada kegiatan seperti itu lagi. Dulu itu masih di Kantor Lingkungan Hidup bukan di Dinas Lingkungan Hidup.

#### Reference 3 - 0,44% Coverage

---

Informan 5 : Kalau bencana itu *leading sector* ada di BPBD. Nah BPBD itu kan pelaksana. Mungkin nanti untuk tindak lanjut **kesiapsiagaan** DLH itu memberikan bantuan bibit tanaman/vegetasi dan penanaman kembali di hutan. Pernah juga kita itu melakukan pembangunan tangkis penahan longsor itu tahun 2008/2009 ya di Desa Nglarangan. Sudah lama mbak kita tidak melakukan kegiatan seperti itu.

---

**Reference 4 - 0,44% Coverage**

Informan 5 : Iya seharusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor dapat meningkatkan **kesiapsiagaan** masyarakat. Wilayah mana saja itu seharusnya bikin masyarakat lebih waspada dan harus siap repon dalam menghadapi bencana. Jadi ya pasti meningkatkan kesiapsiagaan bencana longsor.

---

**Reference 5 - 0,44% Coverage**

Informan 5 : Iya seharusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Wilayah mana saja itu seharusnya bikin masyarakat lebih waspada dan harus siap repon dalam menghadapi bencana. Jadi ya pasti meningkatkan kesiapsiagaan bencana longsor.

---

## 9. Koding Variabel Pengetahuan Tentang Risiko

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 8 references coded [1,46% Coverage]

**Reference 1 - 0,45% Coverage**

Informan 1 : La iya itu, urusan untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko bencana bagi mereka itu dinomor belakangan. Bahkan bukan hanya warga situ yang panik, desa sebelah juga ikut panik. Tidak ada kejadian minta diungsikan dan direlokasi.

**Reference 2 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Kalau untuk kesiapsiagaan di sana itu sudah Desa Tangguh Bencana. Jadi sudah ada Forum Pengurangan Risiko dan Tim Relawan. Jadi BPBD disalahkan ya tidak bisa karena itu sudah kita lakukan semua. Dan bencana itu kan segitiga yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau masyarakatnya tidak **pengetahuan risiko bencana** sama juga bohong. Mungkin untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke masyarakat seperti suara EWS dapat diganti seperti suara kaleng cat agar masyarakat lebih waspada, kalau suaranya seperti sirine nanti dikiranya suara ambulance. Suara sirine itu ternyata juga berpengaruh ternyata.

---

**Reference 3 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian penyebaran informasi dan komunikasi mengenai cuaca dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang **pengetahuan tentang risiko** bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti

dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma diinterpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

#### Reference 4 - 0,14% Coverage

Informan 1 : Nah gini, setiap tahun dana desa itu kan ada yang untuk penanggulangan bencana. Di Selopuro itu minta anggaran ke Pak Lurah untuk sosialisasi ke masyarakat dan itu sudah dilakukan. Cuma tadi itu loh waktu terjadinya bencana pas magrib dan **pengetahuan risiko bencana** masyarakat kurang. Kalau kayak gini kejadian lagi pasti udah sadar karena sudah kejadian.

#### Reference 5 - 0,16% Coverage

Informan 1 : Untuk **peningkatan pengetahuan risiko** bencana, BPBD membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi Desa Tangguh paling lengkap. Desa Tangguh itu wajib sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di desa itu. Pemberian materi berkaitan dengan peningkatan pengetahuan risiko seperti disampaikan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Kita juga melatih PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat). Bagaimana mengatasi orang patah tulang dan luka terbuka. Pokoknya paling lengkap Desa Tangguh itu, tinggal mau bergerak atau tidak.

#### Reference 6 - 0,16% Coverage

Informan 1 : Untuk peningkatan pengetahuan risiko bencana, BPBD membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi Desa Tangguh paling lengkap. Desa Tangguh itu wajib sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di desa itu. Pemberian materi berkaitan dengan **peningkatan pengetahuan risiko** seperti disampaikan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Kita juga melatih PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat). Bagaimana mengatasi orang patah tulang dan luka terbuka. Pokoknya paling lengkap Desa Tangguh itu, tinggal mau bergerak atau tidak.

#### Reference 7 - 0,14% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu **pengetahuan risiko bencana** masyarakat, kearifan lokal belum dimanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya

---

PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

---

**Reference 8 - 0,14% Coverage**

Informan 1 : Iya mbak untuk pengurangan risiko bencana empat hal itu sangat penting yaitu **pengetahuan risiko bencana** masyarakat, kearifan lokal belum termanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 3 references coded [1,46% Coverage]

**Reference 1 - 0,49% Coverage**

Informan 2 : Kalau pemberian **pengetahuan tentang risiko** bencana itu peran dari BPBD termasuk nanti mereka itu membuat Desa Tanggap Bencana. Memberikan pengetahuan tentang risiko berupa edukasi kepada masyarakat melalui relawan itu mengenai tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut.

---

**Reference 2 - 0,49% Coverage**

Informan 2 : Kalau pemberian pengetahuan tentang risiko bencana itu peran dari BPBD termasuk nanti mereka itu membuat Desa Tanggap Bencana. Memberikan **pengetahuan tentang risiko** berupa edukasi kepada masyarakat melalui relawan itu mengenai tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut.

---

**Reference 3 - 0,49% Coverage**

Informan 2 : Seharusnya bisa, karena fungsi dari pemetaan tingkat kerawanan bencana itu agar kesiapsiagaan masyarakat lebih meningkat. Namun memang pemahaman dan **pengetahuan tentang risiko** yang dimiliki masyarakat masih kurang. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang praktek langsung di lapangan. Selama ini kendala itu memang di sosial masyarakatnya. Karena menyadarkan masyarakat itu susah juga.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 2 references coded [0,76% Coverage]

**Reference 1 - 0,14% Coverage**

Informan 3 : Sistem peringatan dini untuk mengetahui **risiko** bencana itu yang lebih tau di BPBD ya mbak. Kalau sejauh ini PU itu bergerak di sebelum bencana misalnya membangun gorong-gorong kemudian saat bencana itu misalnya jembatan atau jalan terputus dari PU harus membangunkan jembatan atau jalan darurat agar akses tidak terputus.

---

**Reference 2 - 0,62% Coverage**

Informan 3 : Untuk meningkatkan **pengetahuan tentang risiko** bencana dilakukan pemberian Pendidikan tanggap bencana oleh BPBD. Karena yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap bencana. PU hanya mendukung mengenai pembangunan mbak.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 3 references coded [0,76% Coverage]

#### Reference 1 - 0,34% Coverage

Informan 4 : Jadi gini peringatan dini berupa penyebaran informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirnya rugi. Kalau penyebaran informasi dan komunikasi bidang klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk peningkatan **pengetahuan tentang risiko**. Sekolah lapang itu ada untuk para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan tentang risiko bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan.

#### Reference 2 - 0,34% Coverage

Informan 4 : Jadi gini peringatan dini berupa penyebaran informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirnya rugi. Kalau penyebaran informasi dan komunikasi bidang klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk peningkatan pengetahuan tentang risiko. Sekolah lapang itu ada untuk para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai **pengetahuan tentang risiko** bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan.

#### Reference 3 - 0,08% Coverage

Informan 4 : Iya pasti mempermudah masyarakat melakukan interpretasi **risiko** bencana karena penyebaran informasi dan komunikasi dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini atau respon masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 2 references coded [1,09% Coverage]

#### Reference 1 - 0,88% Coverage

Informan 5 : Itu kegiatannya sudah dilakukan dulu sekali. Jadi pemberian Pendidikan tanggap bencana untuk meningkatkan **pengetahuan tentang risiko** bencana dilakukan dengan penyuluhan dan pemberian bibit tanaman ke masyarakat. Itu kayaknya sebelum ada BPBD. Sekarang setelah ada BPBD sudah ditangani oleh BPBD. Kemudian kalau penyebaran informasi dan komunikasi ini sudah dilakukan BPBD ya karena yang berkaitan langsung dengan kebencanaan itu BPBD. Termasuk untuk identifikasi wilayah mana yang risiko longsor itu di BPBD. Cuma kita kan ada alat berat yang bisa dipinjam untuk pencarian korban saat bencana terjadi.

#### Reference 2 - 0,20% Coverage

Informan 5 : Itu kegiatannya sudah dilakukan dulu sekali. Jadi pemberian Pendidikan tanggap bencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko bencana dilakukan dengan penyuluhan dan pemberian

bibit tanaman ke masyarakat. Itu kayaknya sebelum ada BPBD. Sekarang setelah ada BPBD sudah ditangani oleh BPBD. Kemudian kalau penyebaran informasi dan komunikasi ini sudah dilakukan BPBD ya karena yang berkaitan langsung dengan kebencanaan itu BPBD. Termasuk untuk identifikasi wilayah mana yang **risiko** longsor itu di BPBD. Cuma kita kan ada alat berat yang bisa dipinjam untuk pencarian korban saat bencana terjadi.

## 10. Koding Variabel Penyebaran Informasi dan Komunikasi

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 1> - § 11 references coded [3,53% Coverage]

### Reference 1 - 0,92% Coverage

---

Informan 1 : Iya, sampean dapet poin aku juga dapet poin. Aku mesti gitu, jadi BPBD itu kesulitan meyakinkan pengampu/pengambil keputusan untuk melaksanakan mitigasi sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tapi kembali lagi pengambilan kebijakan yang paling utama bukan tugasnya BPBD karena BPBD itu kan hanya sebuah badan tempat untuk koordinasi. Yang action itu kan ya dinas teknis, contohnya orang PU. Makanya jangan asal melakukan pengambilan kebijakan untuk memberikan izin bangunan. Atau loh aku nggak pernah ngasih izin bangunan kok, orang desa itu malah menghiraukan kalau harus punya izin bangunan. **Oleh sebab itu mulai sekarang harus disosialisasikan bahwa pengambilan kebijakan dengan memberikan izin mendirikan bangunan itu penting untuk mengetahui bahwa ini area rawan.** Jangan terus mikir e lawong iku mesti bayar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah susah meyakinkan masyarakat untuk bisa mengerti. Taunya mereka itu bayar. Bahkan aku wes ekstrem, orang-orang yang tinggal di daerah Gerakan tanah kalau bisa Izin Mendirikan Bangunan nya gratis. Jadi untuk menghilangkan bahwa ini urusan bayar membayar. Justru dengan pengambilan kebijakan berupa IMB itu adalah alat screening kita bahwa ini menurut peta rawan gerakan tanah.

---

### Reference 2 - 0,42% Coverage

Informan 1 : Mau, ya sama masyarakat pun berpikinya seperti itu. **Disosialisasi susah, dibilangi kalau ini itu nggak layak untuk hunian ya susah, ya alasannya punyanya ya itu.** Akhirnya setelah kejadian jadi nurut. Sekarang pertanyaannya di balik, jadi perlu kejadian dulu ya..ya monggo.

### Reference 3 - 0,19% Coverage

---

Informan 1 : Kalau untuk kesiapsiagaan di sana itu sudah Desa Tangguh Bencana. Jadi sudah ada Forum Pengurangan Risiko dan Tim Relawan. Jadi BPBD disalahkan ya tidak bisa karena itu sudah kita lakukan semua. Dan bencana itu kan segitiga yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Kalau masyarakatnya tidak pengetahuan risiko bencana sama juga bohong. Mungkin untuk **penyebaran informasi dan komunikasi** ke masyarakat seperti suara EWS dapat diganti seperti suara kaleng cat agar masyarakat lebih waspada, kalau suaranya seperti sirine nanti dikiranya suara ambulance. Suara sirine itu ternyata juga berpengaruh ternyata.

---

#### Reference 4 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Kesiapsiagaan desa-desa yang ada di atas itu sudah ada Desa Tangguh Bencana, kalau forumnya sudah bilang saat ini musim hujan nanti rawan longsor jadi harus waspada. Kemudian **penyebaran informasi dan komunikasi** mengenai cuara dari BPBD juga sudah dikirim ke sana. Terus tim relawannya juga sudah siap, jangan takut nanti kalau ada bencana kita sudah siap. Yaitu kembali lagi masyarakatnya yang masih kurang pengetahuan tentang risiko bencana. Padahal sosialisasi sudah dilakukan setiap tahun. Mungkin yang harus diubah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu dua hal, pertama sering simulasi dan kedua suara alat EWS itu diganti dengan yang lebih mengena. Bunyinya itu antara sirine dan kentongan pasti lebih didengarkan kentongan. Nah ini kearifan lokal rencananya akan kita tumbuhkan. Nanti forum digeser, kalau ada peringatan dini sirine bunyi kalian harus pukul kentongan. Saat ini kentongan masih dipakai untuk memberikan tanda kalau mau *genduren/slametan*. Kalau untuk tanda bahaya masih tidak direspon oleh masyarakat. Kita juga selalu memberikan peringatan melalui banner. Tapi kalau peringatan bencana berupa banner sama masyarakat cuma di interpretasi kan sebagai hiasan ya tidak tahu lagi. Jadi saya kasih tau Pak Lurahnya wilayah yang miring-miring jangan ada rumah atau tempat café. Karena kemarin itu yang longsor di daerah yang miring-miring.

#### Reference 5 - 0,19% Coverage

Informan 1 : **Penyebaran informasi dan komunikasi** sudah dilakukan melalui sosialisasi pada saat pembentukan Destana. Kegiatan pertama itu pasti mengenali ancaman dan potensi untuk menghadapinya. Kalau mengungsi itu nanti ke mana itu sudah dilakukan. Kita mengumpulkan 30 orang yang nantinya mereka diberikan tugas untuk menyampaikan/sosialisasi ke masyarakat di forum pengajian, dan lainnya. Kemudian yang di tempat kejadian longsor kemarin itu sama *kamituwo* sudah dikasih tau juga. Kesimpulannya masyarakat mau tidak menyadari kalau ini penting.

#### Reference 6 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Sudah dilakukan **penyebaran informasi dan komunikasi**. melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Itu sama KEMENDAGRI ditaruh di nomor 1 karena itu barang penting. Nah tentang apakah pemetaan itu mempermudah atau tidak? Ya sebenarnya harusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor itu mempermudah masyarakat, jadi saat pembentukan itu kita kasih tau daerah anda ini rawan longsor menurut pemetaan kawasan rawan bencana longsor.

#### Reference 7 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Sudah dilakukan penyebaran informasi dan komunikasi. melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Itu sama KEMENDAGRI ditaruh di nomor 1 karena itu barang penting. Nah tentang apakah pemetaan itu mempermudah atau tidak? Ya sebenarnya harusnya pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor itu mempermudah masyarakat, jadi saat pembentukan itu kita kasih tau daerah anda ini rawan longsor menurut pemetaan kawasan rawan bencana longsor.

#### Reference 8 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Sudah ada pemanfaatan media elektronik untuk penyebaran informasi dan komunikasi. Contohnya adalah *WhatsApps Group* untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke desa rawan bencana. Terus informasi itu kita dapatkan dari BMKG baik dari Juanda maupun Sawahan. Kalau lagi musim hujan kayak kemarin itu informasinya diperbaharui satu jam sekali. Kita juga berkomunikasi sama orang pengairan. Kalau DAM ini sudah ketinggian sekian yang bawah ini siap banjir harus evakuasi. Kemarin itu sebenarnya juga sudah jelas sosialisasinya kalau saat banjir segera evakuasi nanti jika sudah berhenti 1-2 jam baru boleh kembali. Terus kemarin itu saya juga sudah coba interview beberapa orang sebenarnya terasa tidak kalau mau ada kejadian. Mereka bilang sebenarnya juga terasa karena hujannya lama. Tapi respon masyarakat yang masih kurang.

#### Reference 9 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Sudah ada pemanfaatan media elektronik untuk penyebaran informasi dan komunikasi. Contohnya adalah *WhatsApps Group* untuk penyebaran informasi dan komunikasi ke desa rawan bencana. Terus informasi itu kita dapatkan dari BMKG baik dari Juanda maupun Sawahan. Kalau lagi musim hujan kayak kemarin itu informasinya diperbaharui satu jam sekali. Kita juga berkomunikasi sama orang pengairan. Kalau DAM ini sudah ketinggian sekian yang bawah ini siap banjir harus evakuasi. Kemarin itu sebenarnya juga sudah jelas sosialisasinya kalau saat banjir segera evakuasi nanti jika sudah berhenti 1-2 jam baru boleh kembali. Terus kemarin itu saya juga sudah coba interview beberapa orang sebenarnya terasa tidak kalau mau ada kejadian. Mereka bilang sebenarnya juga terasa karena hujannya lama. Tapi respon masyarakat yang masih kurang.

#### Reference 10 - 0,69% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. **Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid.** Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan komunikasi yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum dimanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

#### Reference 11 - 0,19% Coverage

Informan 1 : Iya pasti BPBD berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD sudah mencoba menunjukkan petanya kalau daerah itu risiko tinggi. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon itu yang susah. Kemudian kepedulian tokoh masyarakatnya itu kurang. Harusnya kalau tim siaga itu memerintah untuk menyiarkan seharusnya itu imam mushola segera memberitahu lewat pengeras suara masjid. Kemarin kita sudah jelaskan kalau salah satu media untuk penyebaran informasi dan

---

**komunikasi** yang bisa digunakan itu pengeras suara masjid. Sebenarnya juga pas sosialisasi itu tokoh masyarakat juga diundang ya tinggal balik lagi kesadaran kurang. Makanya itu pencegahan itu multi pihak dan perannya masing-masing. Kesimpulannya yang saat ini masih lemah itu pengetahuan risiko bencana masyarakat, kearifan lokal belum termanfaatkan, pengambilan kebijakan lemah karena belum punya PERDA Penanggulangan Bencana, dan pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 5 references coded [2,79% Coverage]

**Reference 1 - 0,66% Coverage**

Informan 2 : Oh iya ada untuk **penyebaran informasi dan komunikasi** kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

**Reference 2 - 0,17% Coverage**

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem **Informasi** Tata Ruang Nganjuk). Penyebaran informasi dan komunikasi ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

**Reference 3 - 0,66% Coverage**

Informan 2 : Oh iya ada untuk penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, tahun ini kita sedang menginisiasi SITARUNA (Sistem Informasi Tata Ruang Nganjuk). **Penyebaran informasi dan komunikasi** ini berbentuk *web base* dan *android base*, tapi yang ditampilkan masih empat peta yaitu peta administrasi, peta pola ruang, struktur ruang, dan peta Kawasan Rawan Bencana. Jadi nanti bisa di *overlay*

**Reference 4 - 0,66% Coverage**

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk **penyebaran informasi dan komunikasi** mengenai tingkat kerawanan bencana bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya penyebaran informasi dan komunikasi ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan analisis dan mengeluarkan pengambilan kebijakan secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar by system.

---

**Reference 5 - 0,66% Coverage**

Informan 2 : Iya benar nantinya untuk penyebaran informasi dan komunikasi mengenai tingkat kerawanan bencana bisa dilihat secara mandiri oleh masyarakat melalui SITARUNA. Upaya **penyebaran informasi dan komunikasi** ini adalah bagian dari transparansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Prototipe* nya kemarin saya minta agar bisa melakukan

---

---

analisis dan mengeluarkan pengambilan kebijakan secara otomatis yaitu hasil izin untuk membangun di titik yang diminta. Misalnya diizinkan seluruhnya, diizinkan sebagian atau tidak diizinkan. Nanti bisa keluar by system.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 1 reference coded [0,83% Coverage]

**Reference 1 - 0,83% Coverage**

Informan 3 : Kalau pemberitahuan atau **penyebaran informasi dan komunikasi** itu pasti sebelumnya sudah dilakukan seperti dari BPBD dan BMKG ya sering ngasih berita curah hujan terus ada peringatan dini kalau hujan lebat seperti itu. Tapi kalau hal itu dianggap biasa saja oleh masyarakat dan masyarakat tidak waspada ya kemungkinan terjadi bencana dan menimbulkan risiko besar akan terjadi. Sejauh ini PU hanya bertugas untuk masalah pembangunan sarana dan prasarana ya. Seperti pembangunan drainase gitu. Kalau untuk penyebaran informasi dan komunikasi lebih ke BPBD dan BMKG.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 21 references coded [7,27% Coverage]

**Reference 1 - 0,46% Coverage**

Informan 4 : Kalau **penyebaran informasi dan komunikasi** untuk peringatan dini di bidang meteorologi itu ada tiga yaitu cuaca, maritim, dan klimatologi. Untuk maritim itu khusus untuk penyebaran informasi dan komunikasi peringatan dini gelombang laut, kecepatan angin, rob, dan ketinggian gelombang laut. Dan itu di sampaikan tergantung lamanya kajian kita biasanya 1-3 hari.

**Reference 2 - 0,46% Coverage**

Informan 4 : Kalau penyebaran informasi dan komunikasi untuk peringatan dini di bidang meteorologi itu ada tiga yaitu cuaca, maritim, dan klimatologi. Untuk maritim itu khusus untuk **penyebaran informasi dan komunikasi** peringatan dini gelombang laut, kecepatan angin, rob, dan ketinggian gelombang laut. Dan itu di sampaikan tergantung lamanya kajian kita biasanya 1-3 hari.

**Reference 3 - 0,46% Coverage**

---

Informan 4 : **Penyebaran informasi dan komunikasi** itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan

---

---

angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarkan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 4 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga **Penyebaran informasi dan komunikasi** seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarkan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 5 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di

---

---

sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepataannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu **Penyebaran informasi dan komunikasi** tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarakan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahanya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 6 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepataannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau **Penyebaran informasi dan komunikasi** tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarakan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahanya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 7 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. **Penyebaran informasi dan komunikasi** melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebar lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 8 - 0,13% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebar lewat wa atau media massa atau media online. Dan **penyebaran** informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 9 - 0,12% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarkan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran **informasi** serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 10 - 0,13% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebarkan lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta **komunikasi** itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini

---

---

BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 11 - 0,12% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebar lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan **informasi**. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan Penyebaran informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 12 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Penyebaran informasi dan komunikasi itu real time, hanya saja dalam penyampaian kepada masyarakat perlu analisa dulu. Tidak serta merta disampaikan, Itu di maritim ya. Kalau tentang cuaca itu seperti Juanda di sana juga Penyebaran informasi dan komunikasi seperti arah angin dan kecepatannya kemudian ada awan yang berbahaya tidak. Sehingga pesawat ini boleh terbang atau tidak itu tergantung petugas di Juanda. Kalau misalnya ada awan yang berbahaya tidak diperbolehkan terbang. Awan itu juga kan berpotensi hujan, petir, dan angin kencang. Angin kencang itu ada dua jenis bisa angin kencang sesaat dan muter atau putting beliung. Yang ketiga itu Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi yang diberikan oleh BMKG mengenai musim. Kapan musim hujan, berapa lama, kapan kemarau dan berapa lama itu yang menyampaikan BMKG. Kalau di Jawa Timur itu berada di Karang Ploso, Malang. Kalau Penyebaran informasi dan komunikasi tentang klimatologi itu biasanya bulanan dan juga harian. Jadi ada update terus setiap hari, apa lagi itu yang cuaca peringatan dininya seperti curah hujan itu bahkan persepuh menit ada perubahan. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui radar yang nanti datanya dikirim melalui HP disebar lewat wa atau media massa atau media online. Dan penyebaran informasi serta

---

---

komunikasi itu bisa diakses orang semua orang. Pokoknya di BMKG itu ada ekstrem langsung diberikan informasi. Kecuali cuaca pancaroba itu kan perubahannya drastis ya karena sangat cepat jadi sampai saat ini BMKG belum bisa melakukan **Penyebaran informasi dan komunikasi** yang sangat cepat mengenai cuaca pancaroba itu. Kalau yang tempo 2 jam itu masih bisa.

---

#### Reference 13 - 0,46% Coverage

Informan 4 : Jadi gini peringatan dini berupa **penyebaran informasi dan komunikasi** yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirnya rugi. Kalau penyebaran informasi dan komunikasi bidang klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk peningkatan pengetahuan tentang risiko. Sekolah lapang itu ada untuk para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan tentang risiko bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan.

#### Reference 14 - 0,46% Coverage

Informan 4 : Jadi gini peringatan dini berupa penyebaran informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh BMKG itu untuk pertanian, jadi bagaimana para petani itu megatisipasi pola tanam dan kapan dia menanam. Kalau pola tanamnya itu salah misal saat ini udah masuk musim hujan kalau petani masih menanam melon kan panennya pasti hancur akhirnya rugi. Kalau **penyebaran informasi dan komunikasi** bidang klimatologi ini pasti berhubungan dengan para petani. Makanya di BMKG ini ada Namanya SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk peningkatan pengetahuan tentang risiko. Sekolah lapang itu ada untuk para nelayan dan petani. Ini masuk pada edukasi ke masyarakat mengenai pengetahuan tentang risiko bencana. Adanya edukasi ini diharapkan dapat diterima oleh seluruh nelayan dan petani agar terhindar dari kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan.

#### Reference 15 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya melakukan **penyebaran informasi dan komunikasi** mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu ESDM. Kita hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu penyebaran informasi dan komunikasi misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.

---

#### Reference 16 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu ESDM. Kita hanya melakukan **penyebaran informasi dan komunikasi** curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu penyebaran informasi dan komunikasi misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.

---

#### Reference 17 - 0,46% Coverage

---

Informan 4 : Kalau khusus masalah longsor, BMKG hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi mengenai curah hujannya. Sedangkan yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu ESDM. Kita hanya melakukan penyebaran informasi dan komunikasi curah hujannya berapa sehingga daerah-daerah mana yang menurut ESDM berpotensi longsor itu perlu disiapkan. Nah yang punya peta tingkat kerawanan bencana itu biasanya BPBD. Kenapa BPBD karena yang pertama menangani masalah evakuasi. Kalau BMKG itu **penyebaran informasi dan komunikasi** misal curah hujannya saat ini tinggi jadi BPBD harus memetakan daerah sini tidak aman dan daerah sana aman. Seperti itu.

---

#### Reference 18 - 0,12% Coverage

Informan 4 : Koordinasi untuk pengambilan kebijakan segera dilakukan langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan **informasi**, melainkan kadang mereka tidak melihat informasi yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan informasi BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinnya juga bisa lewat hp.

#### Reference 19 - 0,12% Coverage

Informan 4 : Koordinasi untuk pengambilan kebijakan segera dilakukan langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan informasi, melainkan kadang mereka tidak melihat **informasi** yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan informasi BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinnya juga bisa lewat hp.

#### Reference 20 - 0,12% Coverage

Informan 4 : Koordinasi untuk pengambilan kebijakan segera dilakukan langsung ke WhatsApp semua. Jadinya BMKG dan instansi-instansi langsung terkoneksi dengan WhatsApp Group. Artinya pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik dalam hal kebencanaan itu semua sudah masuk dalam 1 group. Kalau sampai ada yang terlewat itu bukan BMKG tidak memberikan informasi, melainkan kadang mereka tidak melihat informasi yang diberikan oleh BMKG di grup koordinasi. Dan **informasi** BMKG sekarang ini yang berkaitan dengan kegempaan itu sudah bisa diakses lewat hp. Sirinnya juga bisa lewat hp.

#### Reference 21 - 0,46% Coverage

Informan 4 : Iya pasti mempermudah masyarakat melakukan interpretasi risiko bencana karena **penyebaran informasi dan komunikasi** dari BMKG itu membantu meningkatkan sistem kewaspadaan dini atau respon masyarakat. Kalau saat hujan lebat harus waspada seperti itu.

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 5> - § 1 reference coded [1,19% Coverage]

#### Reference 1 - 1,19% Coverage

Informan 5 : Itu kegiatannya sudah dilakukan dulu sekali. Jadi pemberian Pendidikan tanggap bencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko bencana dilakukan dengan penyuluhan dan pemberian bibit tanaman ke masyarakat. Itu kayaknya sebelum ada BPBD. Sekarang setelah ada BPBD sudah ditangani oleh BPBD. Kemudian kalau **penyebaran informasi dan komunikasi** ini sudah dilakukan BPBD ya karena yang berkaitan langsung dengan kebencanaan itu BPBD. Termasuk untuk identifikasi wilayah mana yang risiko longsor itu di BPBD. Cuman kita kan ada alat berat yang bisa dipinjam untuk pencarian korban saat bencana terjadi.

## 11. Koding Variabel Prediksi

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 2> - § 1 reference coded [0,15% Coverage]

#### Reference 1 - 0,15% Coverage

---

Informan 2 : BAPPEDA itu salah satu anggota tim pemberi masukan/pertimbangan untuk pengambilan kebijakan berupa pemberian izin dengan mengoverlaykan dengan rencana pola ruang dan kawasan rawan bencana. Kalau tinggi ya tidak kita setuju kalau usulannya untuk budidaya. Nah disitulah peran pemetaan tingkat kerawanan bencana tanah longsor sebagai alat **prediksi** munculnya risiko bencana.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 3> - § 1 reference coded [0,19% Coverage]

#### Reference 1 - 0,19% Coverage

---

Informan 3 : Iya benar, kalau **prediksi** dengan pemetaan tingkat kerawanan bencana itu diremehkan dan dianggap tidak penting ya bencana seperti kemarin di Ngetos Selopuro itu pasti bisa terjadi lagi.

---

<Internals\INFORMAN\TRANSKRIP INFORMAN 4> - § 1 reference coded [0,10% Coverage]

Reference 1 - 0,10% Coverage

---

Informan 4 : Pasti iya mbak. Karena untuk membuat pemetaan tingkat kerawanan bencana longsor juga membutuhkan peta curah hujan dan kegempaan dari BMKG. Yang paling sering digunakan itu data curah hujan. Sebab perlu diketahui bahwa longsor itu belum tentu disebabkan oleh gempa. Sangat kecil biasanya longsor yang diakibatkan oleh gempa. Lain halnya dengan curah hujan. Tingginya curah hujan pasti bisa menyebabkan tanah longsor. Sehingga **prediksi** untuk lokasi yang rawan bencana sangat penting.

---

## Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan BMKG Stasiun Geofisika III Kab Nganjuk



Gambar 2 Wawancara dengan BPBD Kab Nganjuk



Gambar 3 Wawancara dengan BAPEDA Kab Nganjuk



Gambar 4 Wawancara dengan Dinas PUPR Kab Nganjuk



Gambar 5 Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab  
Nganjuk